

Buletin BPIW • Sinergi

Media Informasi & Komunikasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

KEMENTERIAN PUPR
BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH



**Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur
Melalui Pra Konreg**

**Pembangunan Infrastruktur
Dorong Munculnya Industri Pariwisata**



Edisi 02/Februari 2016



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR**

INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI

Gedung BPIW Lantai 1

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: humasbpiw@gmail.com

Telp. +6221-7279 8112

www.bpiw.pu.go.id

 [@informasibpiw](https://twitter.com/informasibpiw)

 [Layanan Informasi BPIW](#)



Pelindung:

A. Hermanto Dardak

Penasehat:

Dadang Rukmana

Pengarah:

Hadi Sucahyono
Harris H. Batubara
Rezeki Peranginangin
Kuswardono

Pemimpin Redaksi:

P. Yudiantoro

Redaktur Pelaksana:

Shovich

Redaksi:

Etty Winarni
M. Salahudin Rasyidi
Mochammad Tranggono
Hari Suharto Diyaksa
Erwin Adhi Setyadhi
Wahyu Hendrastomo
Melva Eryani Marpaung

Editor :

Hendra Djamal
Meylinda
Aji

Kontributor:

Mutri Batul Aini
Andina Dwiky
Ichlasul Naufal
Nina Indahsari
Dian Rosnawati

Diterbitkan oleh:

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
(BPIW) Kementerian PUPR

Alamat Redaksi:

Gedung G, BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 11210
Email: humasbpiw@gmail.com
Website: www.bpiw.pu.go.id
Twitter: [@informasiBPIW](https://twitter.com/@informasiBPIW)
Youtube: Layanan informasi BPIW
No. Telp. +6221-7279 8112

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:
humasbpiw@gmail.com

Cover : Ilustrasi Kinerja Keterpaduan BPIW
Design : Heri Hito

SALAM REDAKSI

Pembaca yang budiman, sebagaimana kita ketahui, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas tersebut, BPIW baru saja mengadakan Pra Konsultasi Regional atau yang biasa disebut Pra Konreg di empat kota yaitu, Medan, Yogyakarta, Denpasar dan Makassar. Dalam buletin Sinergi edisi kedua ini, akan dibahas selengkapnya mengenai pelaksanaan kegiatan Pra Konreg yang berlangsung selama bulan Februari tersebut dan juga rencana keterpaduan program pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, dan beberapa pulau di Indonesia Timur seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Sedangkan dalam laporan khusus, akan dibahas mengenai rencana pengembangan Danau Toba dan Tanjung Lesung sebagai bagian dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang diprioritaskan pemerintah.

Kami juga menyajikan rubrik Wawancara bersama Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR (PPEKI) BPIW Harris H. Batubara. Dalam wawancara ini Kepala PPEKI memaparkan mengenai hasil dari pelaksanaan 4 kali Pra Konreg dan rencana pelaksanaan Pra Konreg sebagai wadah Pemerintah Daerah mengusulkan program pembangunan tahun anggaran 2017.

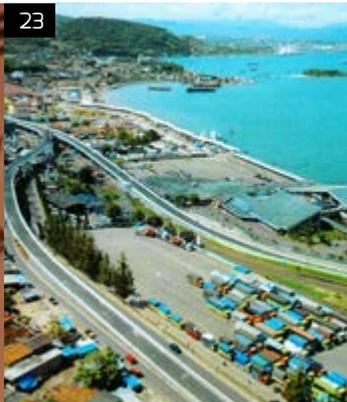
Pembaca juga dapat menikmati sajian informasi mengenai kegiatan BPIW sepanjang bulan Februari, melalui rubrik Kilas BPIW. Pada edisi kali ini kita tampilkan rubrik baru yakni 'WPS Corner'. Dalam rubrik ini dibahas informasi yang berkaitan dengan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Tidak hanya itu, sajian ringan juga telah disiapkan tim redaksi seperti rubrik Jalan-Jalan yang menampilkan kawasan wisata di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian dalam rubrik Tips akan dibahas cara praktis menghindari penyakit saat musim hujan dan rubrik Glossary menampilkan beberapa istilah mengenai kawasan. Kami berharap apa yang disajikan dapat memperkaya wawasan pembaca. Masukan tetap kami harapkan demi kemajuan buletin ini.

Selamat membaca.

daftar isi

Edisi 02/Februari 2016



01 SALAM REDAKSI

02 DAFTAR ISI

03 PERSPEKTIF

Pra Konsultasi Regional
Wadah Keterpaduan dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

04 KABAR UTAMA

Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur Melalui Pra Konreg

12 GLOSSARY

Berbagai Definisi Kawasan

14 REVIEW

Regional Development in Indonesia

16 WAWANCARA

Ir.Harris Hasudungan Batubara, M. Eng.Sc

22 TEROPONG MEDIA

Berita-Positif

23 KILAS BPIW

Bappeda Kabupaten Trenggalek
Kunjungi BPIW Terkait Tindak Lanjut Usulan Pembangunan Infrastruktur

38 LAPORAN KHUSUS

Dukungan Kementerian PUPR Terhadap Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pariwisata

44 OPINI

Membangun Kota Baru Publik di Indonesia

48 INFOGRAFIS

Keterpaduan dan Pengembangan 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 2015-2019

50 TEKNOLOGI

Jakarta *Integrated Tunnel*, Solusi Mengatasi Banjir di Ibukota

52 JALAN-JALAN

Bantimurung, *The Kingdom of Butterfly*

56 POTRET

Kegiatan Pra Konsultasi Regional

58 INFO PRODUK BPIW

Alur Proses Sistem Informasi Pemrograman Tersinkronisasi

59 TIPS

Cara Praktis Menghindari Penyakit Saat Musim Hujan

60 TOKOH

Darmin Nasution
Pembangunan Infrastruktur Dorong Munculnya Industri Pariwisata

Pra Konsultasi Regional

Wadah Keterpaduan dan Sinkronisasi

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), sejak awal hingga akhir Februari, menyelenggarakan Pra Konsultasi Regional atau biasa disebut Pra Konreg. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 kota besar di Indonesia, yakni Medan (4-5 Februari), Yogyakarta (11-12 Februari), Bali (18-19 Februari), dan Makassar (25-26 Februari).

Pra Konreg pertama yang diadakan di Kota Medan dan diikuti 10 Provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Pra Konreg kedua di Yogyakarta diikuti 6 Provinsi yakni Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur.

Kemudian Pra Konreg ketiga di Kota Denpasar diikuti 7 Provinsi yakni Bali, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat, dan Papua.

Pra Konreg keempat di Kota Makassar diikuti 11 Provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Tujuan diadakannya Pra Konreg salah satunya adalah identifikasi awal isu-isu strategis bidang PUPR tahun 2017 sebagai bahan masukan Konreg yang akan dilaksanakan pada bulan Maret. Pelaksanaan Pra Konreg ini sesuai dengan amanat Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019. Dalam Renstra dikatakan bahwa keterpaduan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi investasi. Atas dasar itu, Kementerian PUPR berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui empat sektor yakni Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Program-program dari empat sektor ini kemudian dipadukan.

Untuk memadukannya melalui wilayah pertumbuhan, sebagaimana yang tercantum dalam Renstra. Wilayah pertumbuhan itu terdiri dari wilayah yang sudah berkembang, sedang berkembang, dan pengembangan baru. Wilayah pertumbuhan ini dibagi dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Kemudian, di dalam wilayah-wilayah pertumbuhan itu terdapat kawasan-kawasan, seperti kawasan pelabuhan, industri, pariwisata, dan perkotaan.

Kegiatan ekonomi yang ada di wilayah-wilayah pertumbuhan, dapat berfungsi sebagai pusat produksi, sebagai pusat pengolahan, dan juga sebagai pusat perdagangan. Pembangunan infrastruktur di wilayah pertumbuhan tersebut dipadukan melalui sektor PUPR. Namun pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan di situ saja, tapi pembangunan infrastruktur antar kawasan dan antar wilayah pertumbuhan, juga perlu mendapat perhatian. Dengan landasan itu, Pra Konreg dijalankan sebelum dilaksanakannya Konreg.

Pola pelaksanaan Pra Konreg tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bila dulu, Pra Konreg dilakukan masing-masing sektor. Namun kali ini, Pra Konreg diubah agar antar sektor lebih terlihat komunikasi, interaksi, dan koordinasinya. Caranya dengan membuat Pra Konreg berbasis pulau dan kepulauan. Masing-masing provinsi di Indonesia dibagi dalam beberapa desk. Di dalam desk-desk itu juga ada perwakilan dari sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

Dengan pola seperti ini tercipta komunikasi, interaksi, dan koordinasi. Dengan adanya tiga hal itu, maka terjalin keterpaduan perencanaan dan juga sinkronisasi. Inilah yang menjadi esensi dasar dari pelaksanaan Pra Konreg.

Koordinasi perlu dilakukan, untuk mensinkronkan program masing-masing sektor di lingkungan Kementerian PUPR dan program-program daerah. Agar tercipta koordinasi yang baik, BPIW mengundang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi dan juga dinas-dinas terkait, yakni Cipta Karya, Bina Marga, Perumahan, maupun SDA.

Manfaat lain yang didapat dari koordinasi program ini adalah memadukan program-program yang dibutuhkan untuk didukung sektor lain seperti sektor transportasi. Selain itu beberapa satminkal di lingkungan Kementerian PUPR dapat mensinkronkan programnya masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan suatu daerah.

Pra Konreg menghasilkan banyak masukan yang didapat dari hasil diskusi, konsultasi, dan koordinasi di masing-masing desk. Masukan-masukan terkait rencana program yang akan dilaksanakan ini merupakan cerminan dari kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah. Pada saat Konreg, long list atau daftar panjang dari Pra Konreg tersebut diseleksi yang disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Kemudian setelah diseleksi maka setelah Konreg nanti didapat short list. Daftar pendek ini menjadi cikal bakal Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga atau RKAKL, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA, dan pembangunan infrastruktur apa yang akan dilakukan pada tahun berikutnya.

Meski sukses melaksanakan empat kali Pra Konreg dengan dihadiri rata-rata 500 peserta, namun sebagai panitia penyelenggara, BPIW terus melakukan evaluasi terkait teknis pelaksanaan, agar dapat segera diperbaiki, mengingat usai Pra Konreg pada akhir Februari, direncanakan Konreg dilaksanakan pada bulan Maret. Koordinasi harus dilakukan secara intensif agar Konreg dapat berjalan dengan baik. Diharapkan dengan upaya kerja keras yang dilakukan BPIW dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, akan berdampak pada terjalinnya keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program. Sehingga investasi infrastruktur PUPR lebih efisien dan lebih efektif.

Hendra Djamal



Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur Melalui Pra Konreg

Pembangunan infrastruktur sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilakukan berbasis kewilayahan dengan keterpaduan dari seluruh stakeholder terkait infrastruktur. Dengan semangat keterpaduan tersebut, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menjalankan amanah dari Kementerian PUPR, menggelar Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg sepanjang Februari. Dalam Pra Konreg tersebut, sebanyak 34 provinsi membahas bersama usulan program kerja untuk tahun anggaran 2017. Pra Konreg ini dibagi menjadi empat wilayah penyelenggaraan dan melibatkan seluruh stakeholder baik dari pusat maupun daerah. Pra Konreg merupakan persiapan sebelum pelaksanaan Konreg yang direncanakan di Jakarta, Maret mendatang. Dalam Pra Konreg itu dibahas rencana pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua. Hasilnya, telah didapatkan banyak rencana pembangunan infrastruktur terutama dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di seluruh Indonesia, untuk dilaksanakan tahun depan.



Kepala BPIW memberikan paparan di dalam Pra Konreg di Medan

Sumber: Dok BPIW

Sebelum Pra Konreg dilaksanakan, beberapa kali dilakukan rapat persiapan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dengan melibatkan

satminkal terkait seperti Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

Pra Konreg akhirnya digelar sepanjang Februari di empat kota Pra Konreg yakni di

Kota Medan (4-5 Februari), Yogyakarta (11-12 Februari), Denpasar (18-19 Februari), dan Makassar (25-26 Februari). Masing-masing kegiatan Pra Konreg dilaksanakan selama dua hari.

Pra Konreg untuk wilayah Sumatera yang berlangsung di Kota Medan dibuka Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Ir. Danis. H. Sumadilaga, M. Eng. Sc, pada 4 Februari lalu.

Saat berpidato mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc pada kegiatan tersebut, Danis mengatakan kegiatan pembahasan program pembangunan infrastruktur 2017 ini dapat digunakan untuk mensinkronkan, mensinergikan dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 500 orang peserta dari Kementerian PUPR dan 10 daerah di Pulau Sumatera. Peserta perwakilan dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera yakni Aceh, Sumatera

Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Peserta dari pemerintah pusat berasal dari Kementerian PUPR, yakni Sekretariat Jenderal, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, dan BPIW. Sedangkan peserta dari daerah yakni Bappeda Provinsi, beberapa dinas bidang PUPR (Dinas Kebinamargaan, Dinas Keciaptakaryaan, Dinas Pengelolaan SDA/Pengairan, dan Dinas terkait Perumahan), Balai dan Satker di Lingkungan Ditjen Bina Marga, Satker Cipta Karya, serta Penyediaan Perumahan Provinsi.

Hari pertama Pra Kongreg diisi dengan paparan dari Kepala BPIW, Hermanto Dardak mengenai program di 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan dukungan Kementerian PUPR terkait beberapa program pemerintah seperti pengembangan tol laut, 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas, 15 bandar udara baru, 60 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), dan Kawasan Industri. Paparan Dardak ini terkait beberapa program pembangunan

infrastruktur yang sedang dan akan dilaksanakan di Pulau Jawa.

Dikatakannya dengan melihat kepentingan nasional maka sinergi harus dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga termasuk lintas sektor di luar PUPR seperti kereta api, pelabuhan dan bandara. Dengan pola ini pembangunan infrastruktur PUPR mampu menghasilkan impact dan out-

“Tahun 2016 ini, merupakan tahun pertama PUPR mengaplikasikan secara operasional dalam penyusunan program anggaran yang melibatkan BPIW. Ini bagian dari proses atau upaya untuk memastikan bahwa program PUPR bisa mencerminkan kebutuhan wilayah,” tegas Taufik.

come terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konektivitas, mendukung kedaulatan pangan dan energi, ketahanan air serta mengurangi disparitas antar wilayah.

“Dari 35 WPS, terdapat 6 WPS di Pulau Sumatera. Didalamnya terdapat sektor prioritas yang harus kita dukung seperti sektor

pariwisata salah satunya kawasan Danau Toba, dan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK seperti di Sei Mangke. Dalam membangun tentunya tidak bisa orientasi kedalam kawasan saja. Orientasi kita perlu juga melihat keluar yaitu antar kawasan,” tutur Dardak.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan penjelasan mekanisme desk, presentasi mengenai keterpaduan pembangunan wilayah infrastruktur di provinsi terkait dan diskusi pembahasan aktivitas 2017. Pada hari kedua dilakukan finalisasi diskusi pembahasan aktivitas 2017 dan penandatanganan form usulan program bersama dan pelaporan hasil desk. Seluruh tahapan kegiatan diikuti seluruh peserta dengan antusias. Terbukti dengan tak berkurangnya jumlah peserta yang hadir pada pembahasan masing-masing desk, dimana desk-desk ini dibagi berdasarkan provinsi masing-masing. Sementara perwakilan dari satminkal Kementerian PUPR, bergabung dalam masing-masing desk tersebut. Dengan cara seperti ini diharapkan dapat dilakukan sinkronisasi dan keterpaduan program pembangunan infrastruktur dari masing-masing sektor.



Infrastruktur di Pelabuhan Merak

Sumber: Kementerian PUPR

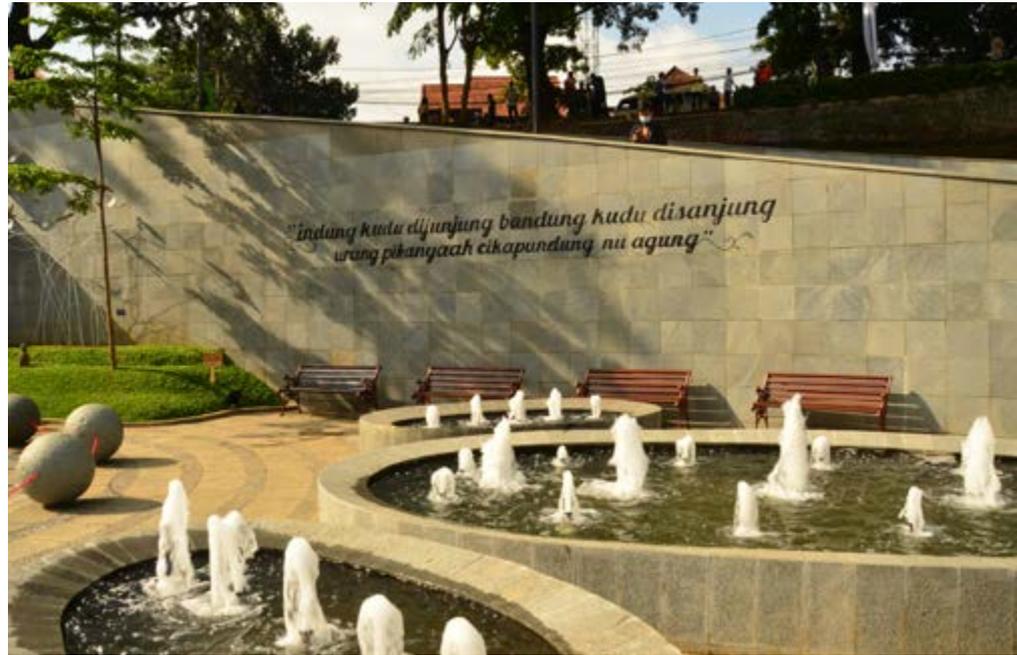
Setelah sukses melaksanakan Pra Konreg di Medan, BPIW Kementerian PUPR menggelar Pra Konreg yang ke-2 di Kota Yogyakarta, 11-12 Februari lalu. Pra Konreg ini kembali dibuka Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M. Eng. Sc., yang mewakili Sekjen Kementerian PUPR Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc. Kata sambutan juga disampaikan Sekretaris Daerah, Drs. Ichsanuri yang mewakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam kesempatan itu Ichsanuri berharap agar pelaksanaan Pra Konreg dapat berjalan dengan semestinya.

Sama seperti Pra Konreg di Medan, 300 lebih peserta yang hadir pada Pra Konreg di Yogyakarta ini berasal dari Kementerian PUPR dan provinsi-provinsi, dimana kali ini provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa yakni Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, Banten, DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Peserta dari Kementerian PUPR, merupakan perwakilan dari Sekretaris Jenderal, Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, dan BPIW. Sedangkan peserta dari provinsi merupakan perwakilan dari Bappeda Provinsi, dinas bidang PUPR (Dinas Kebinarmargaan, Dinas Keciaptakaryaan, Dinas Pengelolaan SDA/Pengairan, dan Dinas terkait Perumahan), Balai dan Satker di Lingkungan Ditjen Bina Marga, Satker Cipta Karya, serta Penyediaan Perumahan Provinsi.

Hari pertama Pra Konreg tersebut juga diisi dengan paparan Hermanto Dardak. Hampir sama dengan paparan di Pra Konreg Medan, di Yogyakarta ini Dardak juga memaparkan program pembangunan infrastruktur dengan pola 35 WPS dari Kementerian PUPR dan dukungan Kementerian PUPR terkait program pembangunan infrastruktur pemerintah yang dilaksanakan kementerian lain. Tentu saja yang dipaparkan Dardak tersebut berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan di Pulau Jawa.

Pada hari pertama ini, juga dilakukan beberapa kegiatan diantaranya penjelasan me-



Salah satu Infrastruktur di Teras Cikapundung

Sumber: Kementerian PUPR

kanisme desk, presentasi mengenai keterpaduan pembangunan wilayah infrastruktur di provinsi terkait dan diskusi pembahasan aktivitas 2017. Pada hari kedua dilakukan finalisasi diskusi pembahasan aktivitas 2017 dan penandatanganan form usulan program bersama dan pelaporan hasil desk masing-masing provinsi.

Usai menggelar Pra Konreg di Yogyakarta,

Widjoyono.

Pra Konreg yang dihadiri 300 peserta ini untuk menterpadukan dan mensinkronkan pembangunan infrastruktur di Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Diharapkan nantinya, pembangunan infrastruktur dapat lebih terakselerasi dengan baik terutama di daerah perbatasan dan kawasan pariwisata. Dalam kesempatan itu Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Bali, Jayadi Jaya juga memberikan kata sambutannya mewakili Gubernur Bali.

Pada Pra Konreg ke-3 ini Hermanto Dardak kembali memberikan paparannya terkait program pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan dilaksanakan Kementerian PUPR dan dukungan Kementerian ini terhadap program-program yang dilaksanakan sektor lain. Dikatakannya bahwa membangun infrastruktur saat ini harus berbasis kewilayah-an, sehingga pembangunan infrastruktur

tidak sekedar dalam bentuk fisik saja, tapi membangun kawasan yang terkoneksi satu sama lain. Kemudian juga suatu kawasan digali potensi yang ada, sehingga dapat berkembang dan juga memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Dari 35 WPS, terdapat 6 WPS di Pulau Sumatera. Didalamnya terdapat sektor prioritas yang harus kita dukung seperti sektor pariwisata salah satunya kawasan Danau Toba, dan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK seperti di Sei Mangke. Dalam membangun tidak bisa orientasi ke dalam kawasan saja. Orientasi kita perlu juga melihat keluar yaitu antar kawasan,” tutur Dardak.

ta, BPIW menggelar Pra Konreg yang ke-3, pada 18-19 Februari lalu. Pra Konreg yang dilaksanakan di Denpasar Bali ini juga dibuka Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Danis.H. Sumadilaga yang mewakili Jenderal Kementerian PUPR, Taufik

Selain diisi dengan kata sambutan dan paparan dari Kepala BPIW, hari pertama juga mulai dilakukan pembahasan terkait program pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan pada tahun 2017. Pembahasan tersebut dilakukan di masing-masing desk yang dibagi berdasarkan provinsi yang ada kawasan Indonesia Timur tersebut dan didalamnya terdapat perwakilan dari daerah dan satminkal terkait. Hari kedua dilanjutkan dengan diskusi di masing-masing desk, finalisasi pembahasan aktivitas 2017 dan penandatanganan form usulan program bersama dan pelaporan hasil desk.

Program kerja 2017, harus sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yakni memacu pengembangan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan wilayah. Hal ini disampaikan Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono yang datang langsung untuk membuka Pra Konreg ke-4 di Kota Makassar, 25 Februari.

"Tahun 2016 ini, merupakan tahun pertama PUPR mengaplikasikan secara operasional dalam penyusunan program anggaran yang melibatkan BPIW. Sebelumnya ditangani Sekretariat Jenderal dalam hal ini biro perencanaan bersama teman-teman satminkal. Ini bagian dari proses atau upaya untuk memastikan bahwa program PUPR bisa mencerminkan kebutuhan wilayah," tegas Taufik.

Dalam acara pembukaan yang dihadiri 500 peserta ini juga dihadiri pejabat di Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Acara juga diisi dengan penyerahan Renstra Kementerian PUPR oleh Sekjen kepada peserta perwakilan provinsi di Pulau Sulawesi dan Kalimantan, yakni perwakilan dari Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Penyerahan Renstra Kementerian PUPR ini juga dilakukan pada Pra Konreg kedua di Yogyakarta (untuk wilayah Jawa) dan ketiga di Denpasar (wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan

program di masing-masing desk. Acara pada hari pertama ini diisi dengan paparan Kepala BPIW Hermanto Dardak terutama mengenai terkait rencana pembangunan infrastruktur wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Pada hari ke-2 disi kembali dengan finalisasi pembahasan masing-masing desk.

Secara umum tujuan dari Pra Konreg ini adalah, pertama, identifikasi awal isu-isu strategis bidang PUPR tahun 2017 sebagai bahan masukan Konreg. Kedua, identifikasi awal rencana aksi pencapaian output dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang PUPR dan atau Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR

Membangun infrastuktur saat ini harus berbasis kewilayahan, sehingga pembangunan infrastruktur tidak sekedar dalam bentuk fisik saja, tapi membangun kawasan yang terkoneksi satu sama lain.

2015-2019 sebagai bahan masukan Konreg.

Ketiga, konsolidasi program tahun 2017 antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor. Kemudian tujuan keempat yakni, mensinkronkan, mensinergikan, dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) tahun 2017 sebagai bahan masukan Konreg.

Saat memberikan arahan, Hermanto Dardak menyatakan pada WPS tersebut, fungsi strategis dari kepentingan nasional, provinsi dan juga daerah, membutuhkan sinergi satu sama lain, termasuk dengan lintas sektor di luar PUPR seperti terkait kereta api, pelabuhan dan bandara sebagai pusat kegiatan strategis. Sehingga pembangunan infrastruktur PUPR mampu menghasilkan impact dan outcome terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konektivitas, mendukung kedaulatan pangan dan energi, ketahanan air serta mengurangi disparitas antar wilayah.

"Dari 35 WPS, terdapat 6 WPS di pulau Sumatera. Didalamnya terdapat sektor prioritas yang harus kita dukung seperti sektor

pariwisata salah satunya kawasan Danau Toba, Kawasan Mandeh, dan Belitung serta Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK seperti di Sei Mangkei. Kemudian, dalam membangun tentunya tidak bisa orientasi kedalam kawasan saja. Orientasi kita perlu juga melihat keluar yaitu antar kawasan," tutur Hermanto.

Pembangunan berbasis WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan "market driven" atau mendorong pasar, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis, mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS, dan mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.

Untuk itu diperlukan keterpaduan perencanaan antara Infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS, dan sinkronisasi program antar infrastruktur terkait (fungsi, lokasi, waktu, besaran, dan dana).

Dalam 4 kali Pra Konreg yang telah dilaksanakan selama bulan Februari, telah dipaparkan Hermanto Dardak mengenai arahan program pembangunan infrastruktur yang perlu dilaksanakan pada tahun 2017 terutama terkait 35 WPS dari Kementerian PUPR dan juga dukungan PUPR terhadap sektor-sektor lain.

Berikut beberapa hal yang dipaparkan Hermanto Dardak tersebut yang dikelompokkan tim atas beberapa pulau atau kawasan, yakni Pulau Sumatera, Jawa, dan Kawasan Timur Indonesia (Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat). Untuk Pulau Sulawesi, dan Kalimantan dikelompokkan dalam satu pembahasan.

Pembangunan Infrastruktur dengan Pendekatan Wilayah Melalui 6 WPS di Pulau Sumatera

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera melalui 6 WPS, yakni WPS 1 Sabang-Banda Aceh-Langsa, WPS 2 Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru, WPS 3 Batam-Tanjung Pinang, WPS 4 Sibolga-Padang-Bengkulu, WPS 5 Jambi-Palembang-Pangkal Pinang-Tanjung Pandan, dan WPS 6 Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api.

Meski penekanan pembangunan infrastruktur di Sumatera di 6 wilayah pertumbuhan tersebut, namun pembangunan di-

pertumbuhan dan telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Beberapa KEK yang perlu di dukung dalam wilayah pertumbuhan, misalnya Kuala Tanjung, Sei Mangke dan Tanjung Api-Api (TAA).

Kemudian Kementerian PUPR juga mendukung pengembangan 10 dari 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di pemerintahan era Presiden Joko Widodo. KSPN yang menjadi prioritas ini berada di Pulau Sumatera, antara lain Danau Toba dan di Tanjung Kelayang di Bitung.

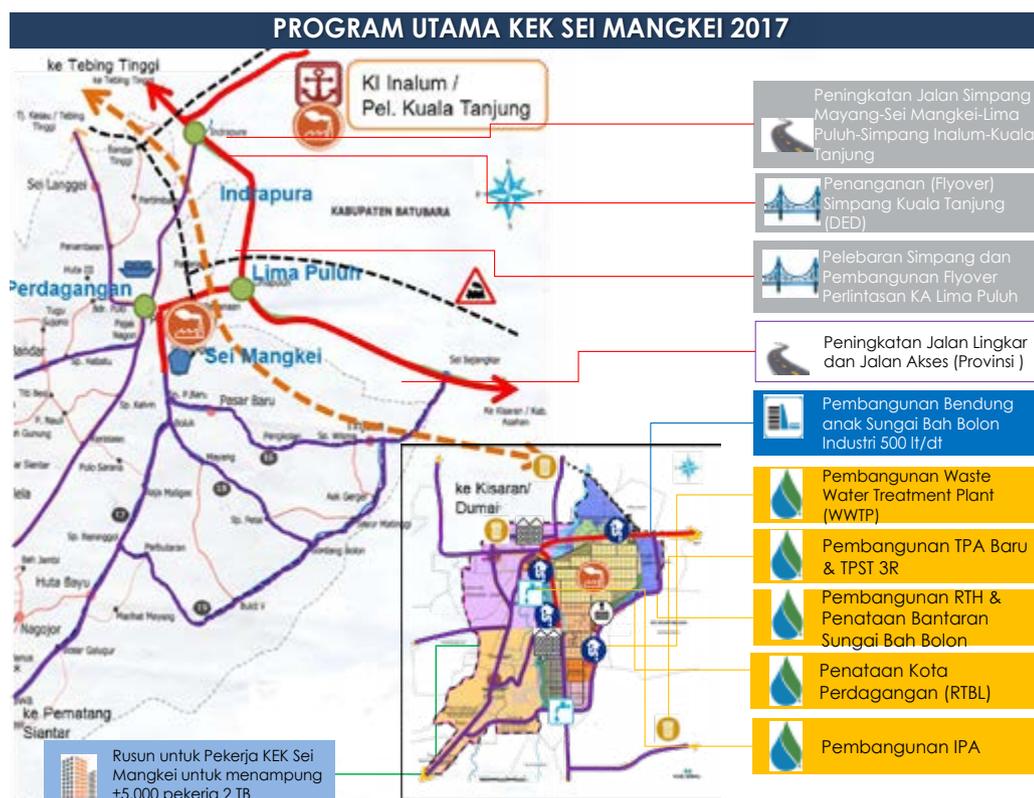
Meski sebenarnya di Sumatera memiliki

agar pengembangan pariwisata di kawasan tersebut dapat dikelola dengan baik.

Untuk infrastruktur jalan, rencana yang disiapkan adalah peningkatan kualitas jalan lingkar Samosir, peningkatan jalan Tele- Pangurusan, dan pembangunan fasilitas cruise ship (kapal pesiar) internasional di pelabuhan baru Kuala Tanjung. Dengan fasilitas ini diharapkan para wisatawan asing yang menggunakan kapal pesiar bisa mampir menikmati keindahan Danau Toba. Selain itu dilakukan peningkatan fasilitas dan kualitas dermaga penyebarangan ke Pulau Samosir dari Ajibata, Sepinggian, Balige, Muara, dan Haranggaol di beberapa kabupaten sekitar Danau Toba.

Jaringan jalan tol juga dikembangkan Kementerian PUPR sepanjang 2.700 km di seluruh Pulau Sumatera dan saat ini program prioritas itu sudah berjalan. Pembangunan jalan tol yakni Medan-Banda Aceh sepanjang 476 km, Tebing Tinggi-Sibolga sepanjang 175 km, Pekanbaru-Medan sepanjang 548 km, Indralaya-Pekanbaru sepanjang 632 km, Pekanbaru-Padang sepanjang 142 km, Palembang-Bengkulu 303 km, dan Bakauheni-Indralaya sepanjang 358 km.

Jalan tol Trans Sumatera ini dikembangkan Kementerian PUPR dengan infrastruktur terintegrasi, terdiri dari 60 m untuk jalan tol 2X2 lajur, 30 m untuk jalur kereta api, dan 30 m untuk jalur utilitas seperti pipa Pertamina, gas, listrik, air minum, dan telekomunikasi.



lakukan di seluruh Pulau Sumatera dengan konteks antar wilayah pertumbuhan dan yang lebih khusus lagi, di dalam wilayah pertumbuhan tadi ada kawasan-kawasan pusat

potensi wisata lainnya seperti di Sabang dan Nias, namun fokus tetap pada 10 prioritas KSPN tersebut. Bahkan pemerintah berencana membentuk Badan Otorita Danau Toba

untuk jalan tol 2X2 lajur, 30 m untuk jalur kereta api, dan 30 m untuk jalur utilitas seperti pipa Pertamina, gas, listrik, air minum, dan telekomunikasi.

Pulau Sumatera juga memiliki 5 dari 13 potensi lumbung pangan nasional. Sebagai satu hinterland potensi yang ada tersebut tentunya bisa di produksi dan difasilitasi sektor-sektor lain yang diberikan nilai tambah, sehingga akan mensejahterakan masyarakat. Kemudian dengan dibangunnya 65 waduk, diharapkan juga kebutuhan air bersih dapat terpenuhi.

Tidak hanya itu, Indonesia juga telah menetapkan tiga Hub internasional (hasil Raker dengan Dirjen Perhubungan Laut tanggal 20 Agustus 2015), yakni Pelabuhan Kuala Tanjung (merupakan pelabuhan hub tol laut untuk Indonesia Bagian Barat), pengganti Pelabuhan Cimalaya yakni Pelabuhan Patimban Indramayu (disiapkan untuk mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok, yang akan segera dibangun), dan Pelabuhan Bitung (disiapkan untuk hub internasional laut).

Hub internasional yang ada di Pulau Sumatera yakni di Kuala Tanjung. Ditetapkannya pelabuhan Kuala Tanjung sebagai Hub internasional juga di dukung Malahayati di Utara, kemudian Teluk Bayur di Sumatera Barat. Telur Bayur dan Kota Padang ini merupakan kota utama di provinsi tersebut.

Keterpaduan juga dilakukan terhadap pengembangan tol laut yakni di Malahayati, Belawan/Kuala Tanjung, Teluk Bayur, Panjang Batu Ampar, Jambi (Talang Duku), dan Palembang (Boom Baru).

Disamping itu, Kementerian PUPR mendukung pembangunan 15 bandara udara. Untuk Pulau Sumatera bandar udara baru itu yakni Letung dan Tambelan. "Distribusi bandara-bandara yang diusulkan terutama 15 bandara yang menjadi perhatian khusus ini perlu dibahas dalam Konreg. Tentunya mendapat perhatian kita," ujar Dardak. Kawasan Kualanamu juga perlu dukungan Kementerian PUPR terkait pembangunan perumahan dan penyediaan air bersih. Upaya mengatasi banjir juga dilakukan di kawasan tersebut.

Kementerian PUPR telah melakukan koordinasi dengan PT. Angkutan Sungai Dermaga Pelabuhan (ASDP) terkait pengembangan kawasan dan pelabuhan Tanjung Api Api di Provinsi Sumatera Selatan.

Kawasan industri juga menjadi salah satu



Jembatan Kahayan Palangkaraya

Sumber: Kementerian PUPR

fokus, dimana Kementerian PUPR memberi dukungan untuk mendapatkan nilai tambah. Salah satu sasaran Kementerian PUPR misalnya di Simalungun dengan perkebunan sawitnya. Kepala Sawit tidak hanya di ekspor saja, tapi juga diberi nilai tambah dengan membangun industri hilirnya yakni di Sei Mangke. Jalan nasional dari Kuala Tanjung juga ikut dibangun. Sei Mangke dan Kuala Tanjung direncanakan menjadi kota baru.

tur yang kuat.

Dengan demikian nantinya kawasan-kawasan strategis dapat tumbuh dan berkembang misalnya mulai dari Kota Banda Aceh hingga Langka. Dengan dibangunnya jalan nasional yang ada bisa mendukung distribusi untuk komoditas yang ada di kawasan tersebut. Nantinya Kementerian PUPR akan melakukan koordinasi dengan sektor terkait seperti mengenai perencanaan dari kereta

api di dalam kawasan yang menjadi tulang punggung. Pola koordinasi seperti ini dapat mendukung potensi daerah, seperti potensi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebagai lumbung pangan nasional.

Produksi pupuk dari Iskandar Muda perlu didukung dengan pengembangan jalan sehingga pupuk dapat didistribusikan ke areal

produksi pertanian. Demikian pula dengan penyediaan air untuk mendukung daerah tersebut sebagai lumbung pangan nasional.

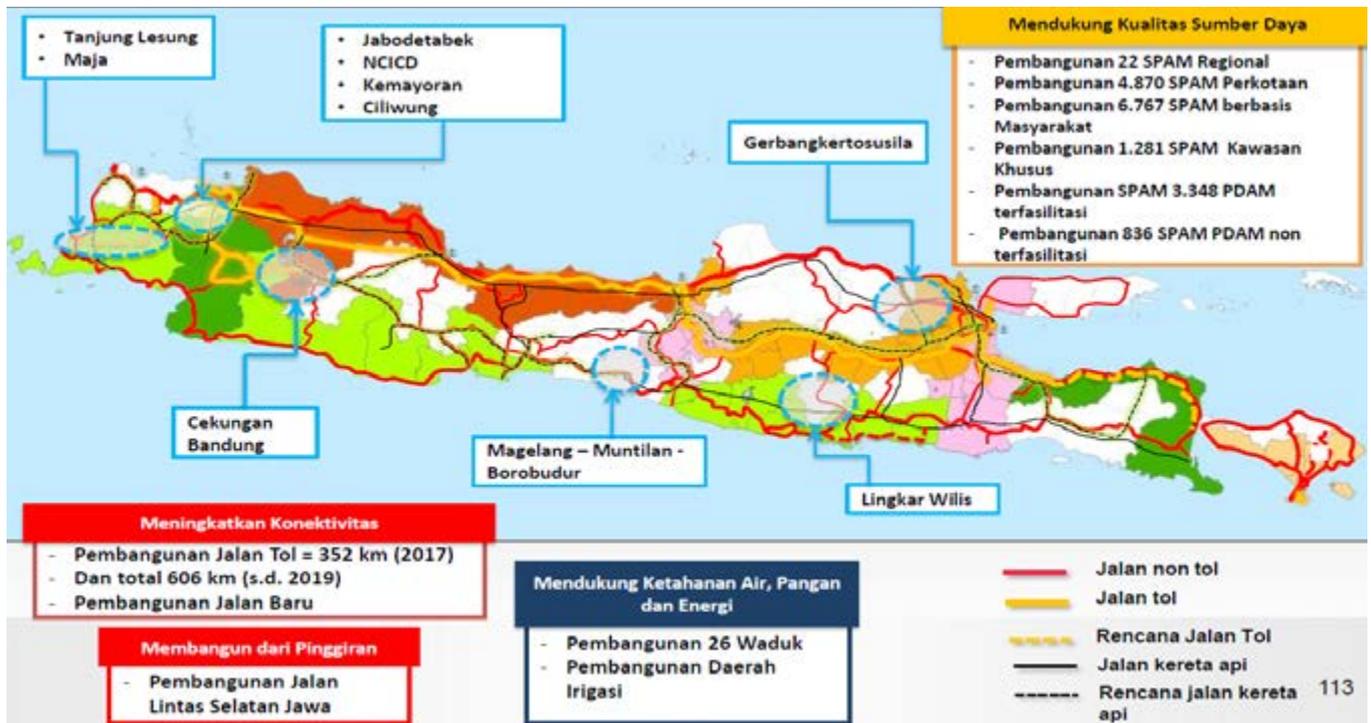
Upaya ini perlu dilakukan melalui dukungan program-program. Kemudian program kegiatan dituangkan dari profil daerah. Ultimted dibuat dalam rencana jangka panjang hingga tahun 2025. Dengan gambaran tadi, merupakan ultimted suatu profil kawasan mana saja yang sudah dapat terdukung.

Wilayah timur esensinya perlu mengandalkan pembangunan infrastruktur di pantai dan maritim. Untuk itu perlu upaya terpadu untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mempunyai impact positif bagi masyarakat

Kedua daerah ini merupakan bagian dari 15 kawasan industri yang diprioritaskan sebagai Hub dan juga sekaligus sebagai industri pelabuhan.

Kementerian PUPR juga memberikan dukungan terhadap program 48 Kota Terpadu Mandiri terutama 34 kota yang ada didalam wilayah pertumbuhan strategis. Pada kawasan yang menjadi pusat penangan transmigrasi ini dibangun kawasan agrobisnis dan agropolitan. Sehingga diharapkan nantinya terbangun kota-kota yang berbasis agrokul-

Keterpaduan Pembangunan di Pulau Jawa Untuk Menghadapi Kompetisi Internasional



Gambar rencana pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa

Pulau Jawa saat ini penyumbang 57% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berdasarkan RPJMN 2015-2019. PDB di Pulau Jawa itu harus terus ditingkatkan untuk menghadapi kompetisi internasional. Apalagi saat ini telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan keadaan ini Pulau Jawa sebagai penyumbang terbesar PDB juga tidak bisa ditinggalkan untuk terus melakukan pengembangan infrastruktur.

Koordinasi dengan beberapa sektor-sektor seperti maritim dan pariwisata juga perlu dilakukan dengan tujuan menyepakati beberapa hal, salah satunya terkait lokasi pelabuhan utama yang akan dikembangkan. Saat ini ada beberapa pelabuhan yang baru akan dikembangkan di Pulau Jawa seperti Tanjung Priok, Kalibaru, serta pengganti pelabuhan Cilamaya yang berada di sekitar Subang. Un-

tuk mendukung itu nantinya akan disiapkan dukungan air bersih, air baku, dan jaringan jalan di kawasan pelabuhan tersebut.

Terkait dukungan terhadap infrastruktur

Koordinasi dengan beberapa sektor-sektor seperti maritim dan pariwisata juga perlu dilakukan dengan tujuan menyepakati beberapa hal, salah satunya terkait lokasi pelabuhan utama yang akan dikembangkan.

perhubungan terutama bandar udara akan terus ditingkatkan. Misalnya bandar udara di Yogyakarta direncanakan akan dibangun di Kabupaten Kulon Progo, yang nantinya akan

ditingkatkan akses untuk mendukung bandar udara tersebut. Selain itu bandar udara Kertajati di Majalengka dipadukan dengan apa yang sebut kota baru berbasis aerocity atau kawasan yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas perkotaan yang saling mendukung dengan kegiatan bandar udara. "Dari tol Cipali akan dibangun akses ke bandar udara Kertajati, dan kita akan bangun aerocity. Ini menjadi perhatian kita di tahun 2017 sehingga nantinya bisa berfungsi," ungkap Dardak.

Dari 35 WPS, Pulau Jawa memiliki 8 WPS, yakni WPS 7 Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi, WPS 8 Jakarta- Cirebon- Semarang, WPS 9 Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap, WPS 10 Yogyakarta-Solo-Semarang, WPS 11 Semarang-Surabaya, WPS 12 Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang, WPS 13 Malang-

Surabaya-Bangkalan, dan WPS 14 Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi.

Dengan WPS yang ada tersebut, keterpaduan dilakukan terkait pengembangan tol laut di Pulau Jawa yakni di Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas. Terkait bandar udara baru, Kementerian PUPR memberikan dukungan terhadap pembangunan 15 bandar udara baru di Indonesia. Untuk Pulau Jawa dibangun Bandar Udara Kerta Jati Majalengka. Terhadap intermoda Kereta Api Kementerian PUPR mendukung dalam hal perlintasan tak sebidang dan peningkatan akses jalan menuju stasiun, dukungan mitigasi banjir dan dukungan air bersih. Pembangunan inermoda Kereta Api di Pulau Jawa yakni di Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak.

Terkait dukungan terhadap 15 Kawasan

Industri prioritas 2015-2015, berdasarkan hasil Rakor dengan Kementerian Perindustrian tanggal 7 Juli 2015, Pemerintah Daerah mengajukan beberapa usulan untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri diantaranya adalah Pembangunan Waduk di

Untuk pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, perlu adanya dukungan melalui pembangunan bendungan baru untuk mendukung penyediaan air di daerah irigasi eksisting dan daerah irigasi baru.

sekitar Kawasan Industri Tuban, pembangunan Jalan Tol dari Tuban ke Gresik serta pembangunan jalan tol yang menghubungkan daerah Pantura ke Jalan Tol Trans Jawa.

Untuk pemantapan ketahanan pangan

melalui peningkatan produksi pangan pokok, perlu adanya dukungan melalui pembangunan bendungan baru untuk mendukung penyediaan air di daerah irigasi eksisting dan daerah irigasi baru. Daerah irigasi di Pulau Jawa tersebar sebagian besar di wilayah utara Pulau Jawa dan sebagian kecil tersebar di beberapa titik di sepanjang DAS, khususnya sungai-sungai besar di Pulau Jawa (Citarum, Ciliwung, Opak, Bengawan Solo, dan Brantas).

Selain dukungan infrastruktur dalam WPS, Kementerian PUPR juga mendukung keterpaduan infrastruktur antar wilayah, contohnya di kawasan strategis Lingkar Wilis-Prigi. Beberapa usulan program ultimate misalnya perumahan khusus kawasan minipolitan di Prigi, Bendungan Tugu, dan jalan lingkar Wilis di ring 1.



Infrastruktur taman wisata di Teras Cikapundung

Sumber: Kementerian PUPR

Mensinkronkan Pembangunan Infrastruktur di Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat

Membangun infrastruktur di kawasan timur Indonesia, seperti Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian PUPR. Apalagi poin pentingnya adalah mensinkronkan dan memadukan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan kawasan. Pada kenyataannya Provinsi Bali relatif lebih maju dibandingkan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Artinya memang harus ada upaya yang lebih tajam di dalam mengurangi disparitas yang ada dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang lebih maju.

Kemudian di sisi lain pembangunan di seluruh daerah harus meningkat, agar dapat bersaing dengan negara lain, apalagi saat ini sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pelabuhan Bitung di Provinsi Sulawesi Utara, menjadi satu dari tiga tiga Hub internasional yang disiapkan untuk hub internasional laut, selain Pelabuhan Kuala Tanjung dan pengganti Pelabuhan Cimalaya yakni Pelabuhan Patimban Indramayu. Dengan demikian Bitung akan menjadi pintu masuk internasional ke wilayah NTT, Maluku dan Papua. Konektifitas menuju Bitung menjadi

pintu untuk tol laut.

Tol laut di wilayah timur harus dihubungkan, dimana nantinya akan terhubung dengan pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara pelabuhan lautnya adalah di Kupang. Sedangkan untuk Maluku di Ternate : A.Yani dan Ambon. Kemudian untuk Pulau Papua, pelabuhan lautnya di Sorong dan Jayapura.

Wilayah timur esensinya perlu mengandalkan pembangunan Infrastruktur di pantai dan maritim. Untuk itu perlu upaya terpadu untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mempunyai impact positif bagi masyarakat. Salah satu yang dapat dilakukan yakni membangun kota baru di Sofifi Provinsi Maluku Utara. Rencana pembangunan waduk yang terdistribusi di wilayah ini mencapai 13 waduk. Jalan tol juga akan dibangun di Bali. Selanjutnya bandar udara akan difokuskan untuk meningkatkan sisi pariwisata di Labuan Bajo. Dari 15 bandar udara baru yang dibangun di Indonesia, Labuan Bajo adalah salah satu prioritas.

Beberapa kawasan industri juga akan dibangun, salah satunya di Halmahera Timur. Hal ini dilakukan untuk memperkecil biaya pengiriman hasil produksi. Disamping itu Kementerian PUPR memprioritaskan pembangunan 10 KSPN agar banyak



Peta Kepulauan NTB



Jembatan Teluk Palu

Sumber: Kementerian PUPR

bagi-bali lainnya seperti daerah Labuan Bajo di NTB, Morotai di Maluku dan Mandalika di NTB. Membangun kawasan timur dari sisi pariwisatanya juga untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Jika dibandingkan dengan Negara tetangga, kunjungan wisatawan ke tanah air hanya 9 juta wisatawan, sedangkan Malaysia mencapai 25 juta wisatawan dan Thailand mencapai 26 juta wisatawan. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ini, World Bank sudah ingin membantu dan berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia masalah pembangunan pariwisata.

Pembangunan Provinsi Bali juga harus diperhatikan pada tahun 2017 seperti terkait akses, Jalan tol, Perumahan, dan segala hal yang menyangkut mengenai tatanan kota. Kementerian PUPR juga mendukung pengembangan wilayah baru yang luasnya lebih besar dari Lombok yaitu Sumbawa Besar dan Bima. Dengan gambaran ini fokus Kementerian PUPR adalah mensinergikan koridor jalan nasional dengan kawasan yang ada di daerah.

Kemudian juga akan dikembangkan yakni wisata geopark yang ada di Tambora Pulau Sumbawa ini. Wisata geopark di daerah itu adalah salah satu wisata yang strategis,

sehingga perlu di dukung. Untuk Pulau NTB secara keseluruhan di Lombok dan Sumbawa, sumbangan PUPR akan cukup signifikan disini, banyak pekerjaan yang akan dilakukan Kementerian PUPR dan disinergikan dengan Mandalika sebagai kawasan strategis nasional untuk wisata, bandara di Lombok yang juga akan didukung.

Wilayah timur esensinya perlu mengandalkan pembangunan Infrastruktur di pantai dan maritim. Untuk itu perlu upaya terpadu untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mempunyai *impact positif* bagi masyarakat

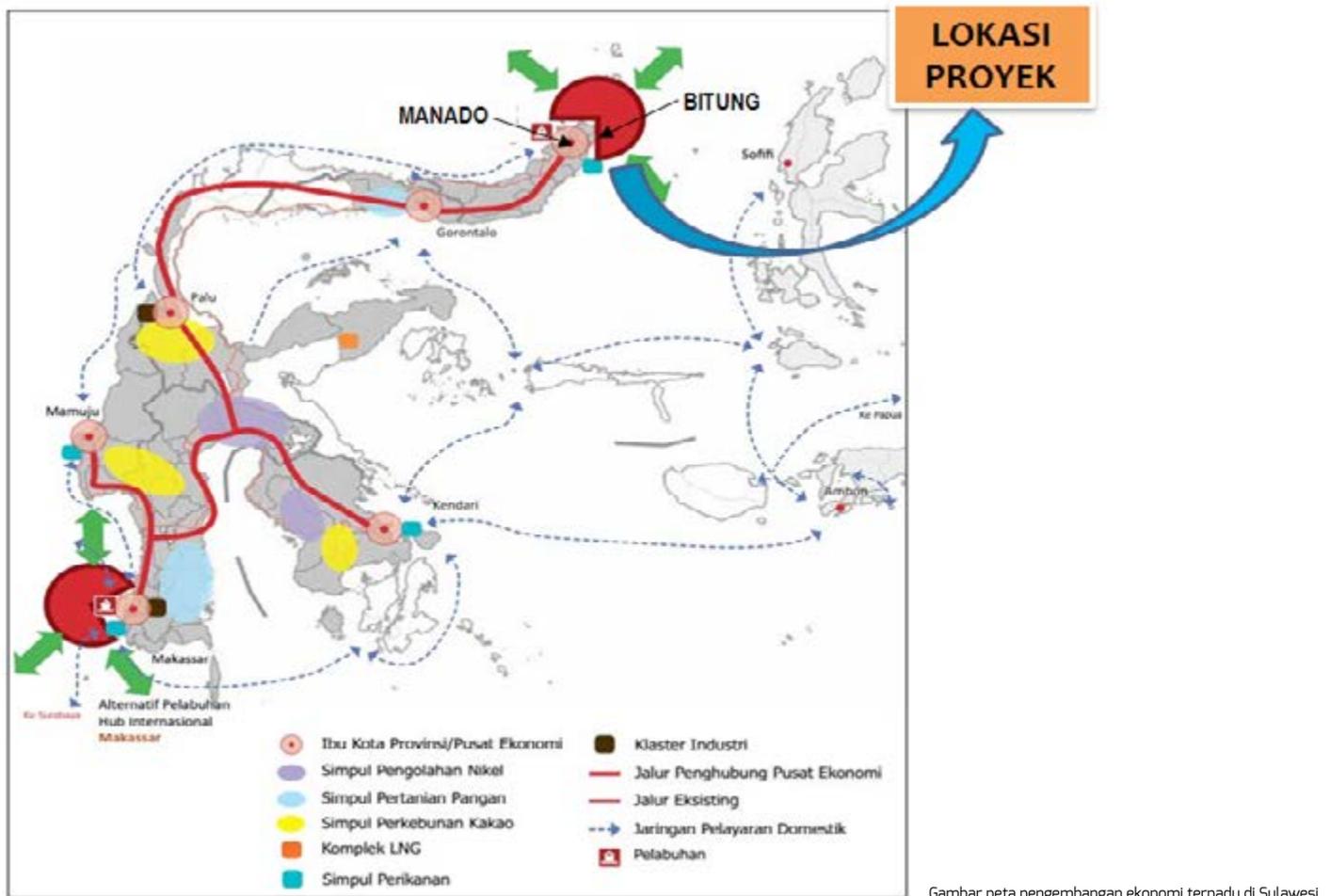
Untuk WPS NTB terutama wilayah pertumbuhan baru, agar infrastruktur dapat berfungsi adalah terkait konektivitasnya, misalnya mulai dari Labuan Bajo diupayakan terkoneksi dengan kota-kota pusat pertumbuhan. Inilah yang tentunya perlu ditingkatkan, bukan hanya jalan tetapi juga terkait geografis daerah tersebut.

Dukungan yang ditekankan di Halmahera Timur untuk akses jalan ke kawasan tersebut. Pelabuhan Jailolo yang dibangun di daerah itu perlu mendapat dukungan untuk akses jalannya aksesnya. Sementara untuk proyek Jembatan Merah Putih di Ambon, Maluku sudah rampung dikerjakan.

Jembatan ini akan menjadi salah satu daya tarik dan mendukung pusat pertumbuhan di kota tersebut. Dengan adanya jembatan ini akses menjadi lebih pendek. Membangun jalan-jalan yang tertuang di wilayah pertumbuhan tersebut terutama untuk perdagangan komoditas cengkeh, pala, dan kelapa. Membangun kawasan berbasis agro ini memerlukan dukungan infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR.

Program utama Pulau Papua dalam mendukung peningkatan konektivitas dan mengurangi disparitas seperti pembangunan jaringan jalan Teluk Bintuni sepanjang 17 km. Semua pembangunan infrastruktur harus dilakukan terkoneksi, terpadu, dan dilakukan sinkronisasi antar sektor baik pemerintah pusat dan daerah sehingga pengembangan wilayah dapat benar-benar diterapkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dukungan Kementerian PUPR Terkait Pengembangan Pulau Sulawesi dan Kalimantan



Gambar peta pengembangan ekonomi terpadu di Sulawesi

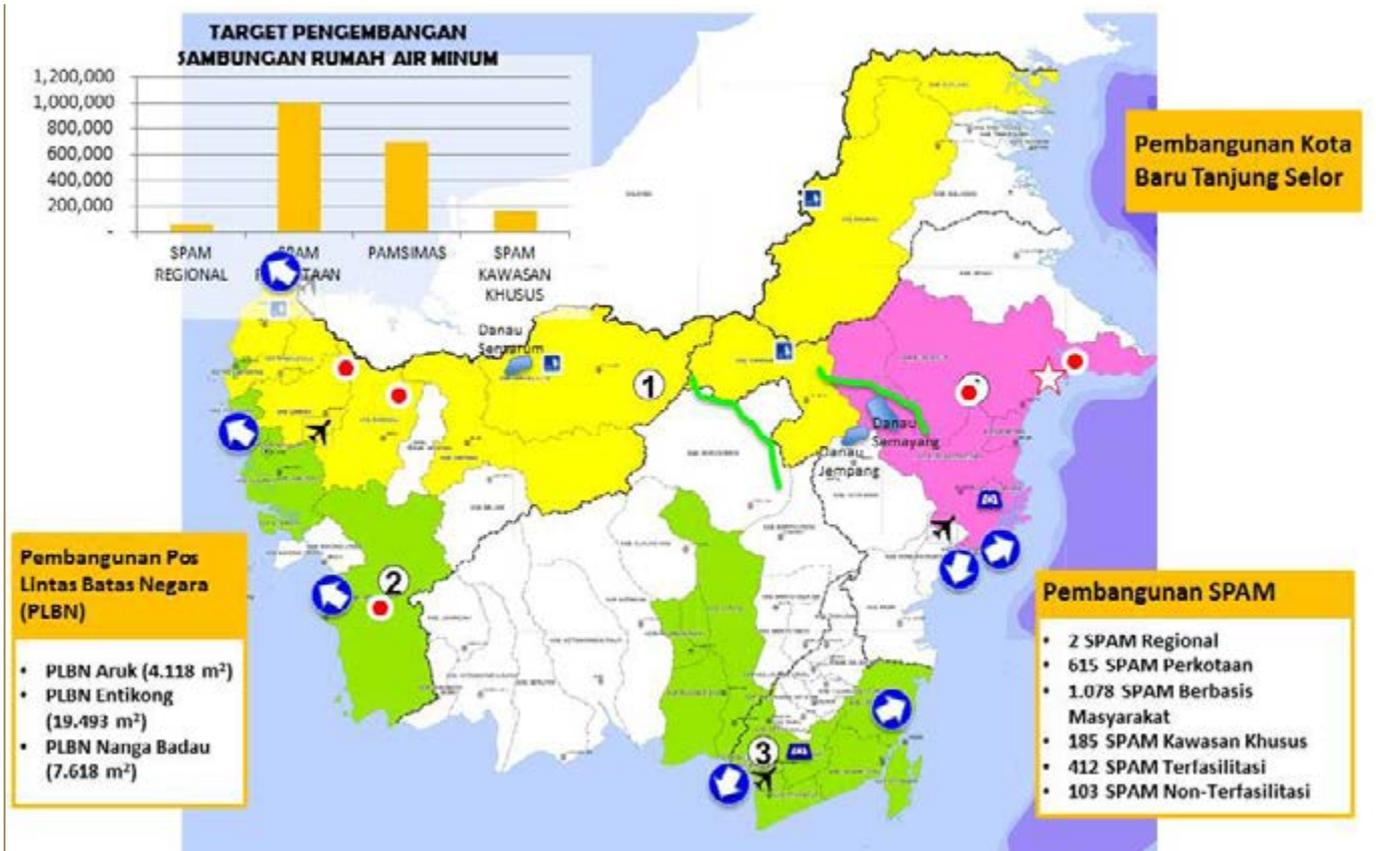
Pengembangan Pulau Kalimantan dan Sulawesi masuk dalam 35 WPS. Hal ini yang tertuang didalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR. Menurut Dardak, pada WPS tersebut, pemerintah juga menuangkannya dalam bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan strategis nasional terkait tata ruang. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar atau Mamminasata telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.

Tidak hanya itu, Pemerintah juga memfokuskan pengembangan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), seperti Da-

nau Toba, Mandalika, Wakatobi, dan Labuan Bajo. Dengan fokus pada 10 KSPN tersebut, Kawasan pariwisata tersebut perlu diberi nilai tambah dengan membangun infrastruktur menuju kawasan wisata dan di dalam kawasan wisata tersebut. Dengan memberi nilai tambah, maka menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Koordinasi dengan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan juga sudah dilakukan terkait Hub Internasional, salah satunya Bitung Sulawesi Utara. Untuk wilayah timur, yang menjadi pintu masuk adalah Bitung dan wilayah barat Kuala

Tanjung. Strategi pintu masuk berbagai produksi di Indonesia seperti itu memerlukan dukungan Kementerian PUPR dengan rancangan pengembangan wilayah.

Disamping itu Kementerian PUPR juga akan membangun jalan by pass Maros hingga Takalar di Sulawesi Selatan. Pembangunan jalan ini untuk mempercepat akses jalan di kawasan tersebut. Dengan membangun jalan, maka secara otomatis akan ada outcome dan impact. Untuk mendukung itu dibutuhkan dana. Dardak menyatakan untuk kawasan yang dianggap prioritas dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).



Program Utama Pulau Kalimantan

Sumber: Kementerian PUPR

Pendanaan pembangunan infrastruktur ini tidak hanya dapat melalui pemerintah, tapi juga dengan kerjasama dengan pihak swasta. Bentuk kerjasamanya melalui Build, Operate, Transfer atau BOT. Misalnya untuk pembangunan jalan Manado-Bitung sepanjang 14,5 km.

Kementerian PUPR termasuk di dalamnya BPIW, mendukung pembangunan bandara terutama bandara kargo. Bandara kargo di luar Jawa banyak ditingkatkan seperti bandara Malabu, Maratewa, Sam Ratulangi, dan Tebuan. Kebutuhan untuk mendukung bandara ini juga diberikan seperti kebutuhan air dan kapasitas jalan.

Pengembangan kawasan industri penting, karena untuk membantu peningkatan taraf hidup masyarakat dan membuka lapangan kerja. Untuk itu Kementerian PUPR akan mengembangkan kawasan industri seperti di Ketapang, Landak, Bitung, Palu, maupun Batu Licin. Selain itu kawasan industri yang akan dibangun, berupa kawasan industri manufaktur seperti di Kawasan Industri

Makassar atau Kima.

Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang akan membangun Kota Terpadu Mandiri. Dukungan akses menuju Kota Terpadu Mandiri

Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk membangun Kota Terpadu Mandiri.

ini dilakukan, misalnya di Sebatik, Maloy dan Gerbang Mas Perkasa. Esensinya pengembangan Kota Terpadu Mandiri berbasis agropolitan. Kawasan pertanian diberi nilai tambah sehingga petani bisa memasarkan produknya.

Air di Waduk Kuwil Sulawesi Utara nantinya juga dipergunakan untuk memasok air di Bitung. Jadi selain jalan tol, Bitung juga me-

merlukan air baku. Selain itu pembangunan daerah perbatasan seperti di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat juga menjadi perhatian Kementerian PUPR. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia. Infrastruktur seperti jalan akan diperlebar mulai dari Balai Karangan hingga Entikong sepanjang 19,2 km.

Hal ini agar memudahkan distribusi barang dan jasa. Pintu masuk lewat Entikong dibangun jalan 4 lajur dari Balai Karangan hingga ke Entikong. Membangun infrastruktur dengan berbasis pengembangan wilayah merupakan komitmen bersama. Untuk mewujudkan hal itu perlu keterpaduan sehingga ada penajaman dan pemantapan komitmen untuk membangun infrastruktur berbasis pengembangan wilayah tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

. Tim redaksi/Meylinda

Berbagai Definisi Kawasan

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Banyak dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR bertujuan untuk meningkatkan manfaat dan fungsi dari kawasan itu sendiri. Istilah kawasan ini ada bermacam-macam, berikut ini kami uraikan beberapa istilah kawasan yang dikutip dari buku Kamus dan Istilah Bidang Pekerjaan Umum yang diterbitkan Puskom Kementerian Umum pada 2012.



Kawasan strategis di Kota Makassar

Sumber: Kementerian PUPR

Kawasan

Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya

Kawasan agropolitan

Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. Kawasan ini disebut juga sebagai embrio kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian dan kegiatan pengolahan produk pertanian.

Kawasan Andalan

Bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun di ruang laut yang pengemban-

gannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

Kawasan berikat/bonded zone

Daerah pabean atau perindustrian khusus; berfungsi sebagai tempat pengolahan barang untuk tujuan ekspor, terbatas di wilayah pabean tertentu yang di dalamnya berlaku ketentuan khusus di bidang kepabeanan.

Kawasan Budi Daya

Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentuk geologi alami yang khas yang dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Wilayah geografis yang memiliki peraturan ekonomi khusus yang lebih liberal dari peraturan ekonomi yang berlaku di suatu negara. KEK memiliki jenis wilayah yang lebih khusus mencakup Daerah Perdagangan Bebas, Daerah Penangan Ekspor-Impor, Daerah Bebas, Kawasan Industri, Pelabuhan Bebas, dan sebagainya.

Kawasan Hutan Lindung

Kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Kawasan Kerjasama ekonomi Sub Regional (Kawasan KESR)

Merupakan kawasan-kawasan yang memiliki potensi sumberdaya unggulan dan se-

cara geografis berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga yang sedang melaksanakan proses integrasi ekonomi dan sebagai zona investasi yang berorientasi keluar, bergeser dari keunggulan komparatif menuju keunggulan sub regional, dengan tujuan menciptakan perdagangan serta secara bilateral/multilateral sepakat untuk menjalin hubungan kerjasama ekonomi sub regional.

Kawasan Lindung

Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan

Kawasan Megapolitan

Kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem

Kawasan Metropolitan

Dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria (i) memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa; (ii) terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan; dan (iii) terdapat keterkaitan fungsi antarkawasan perkotaan dalam satu sistem metropolitan. Sebagai contoh Kawasan Metropolitan Jakarta.

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki potensi untuk cepat tumbuh; dan atau
- b. Mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan atau
- c. Memiliki potensi pengembalian investasi yang besar

KAPET meliputi beberapa Kawasan, antara lain:

1. Sanggau (Kalbar)
2. Batulicin (Kalsel)
3. Kakab (Kalteng)
4. Sasamba (Kaltim)
5. Manado – Bitung (Sulut)
6. Batui (Sulteng)
7. Pare-pare (Sulsel)
8. Bukari (Sultra)
9. Seram (Maluku)
10. Biak (Papua)
11. Bima (NTB)
12. Mbay (NTT)
13. Sabang (NAD)

Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi

perlindungan sistem penyangga keidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Kawasan Perbatasan negara

Wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar.

Kawasan perdesaan

Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perkotaan

Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Permukiman

Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan

Kawasan Pertahanan Negara

Wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata

Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Kawasan yang potensial mengalami bencana alam geologi

Kawasan Resapan Air

Daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air

Kawasan Sekitar Mata Air

Kawasan di sekeliling mata air yang empuhnya manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air

Kawasan siap bangun

Sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan emenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.

Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan Strategis Nasional

Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia

Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional

Kawasan Strategis Provinsi

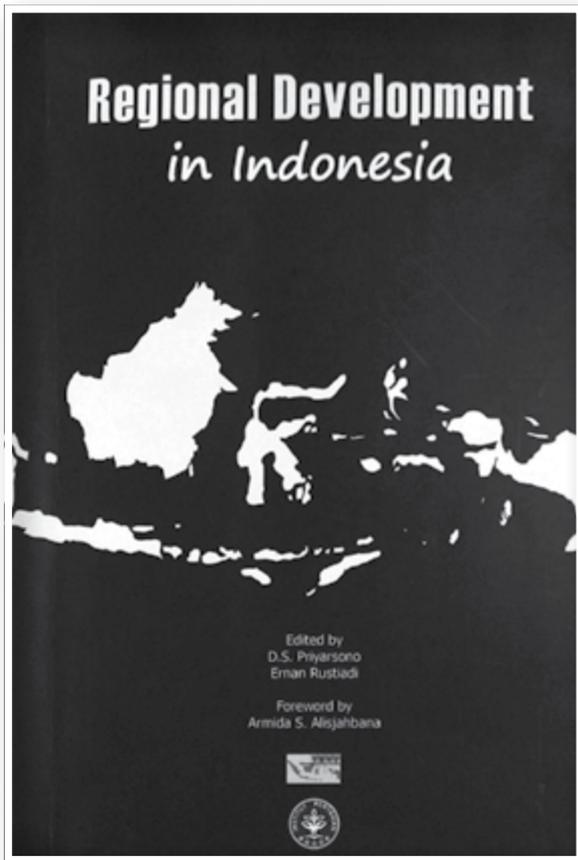
Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan Suaka Alam

Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, yang berupa cagar alam dan suaka margasatwa.

Kawasan Tertentu

Merupakan istilah lama yang diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Dengan berlakunya UU No 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagai pengganti UU no 24/1992 tentang Penataan Ruang, istilah kawasan tertentu menjadi kawasan strategis, baik kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota.



Regional Development in Indonesia

Editor : D.S Priyarsono dan Ernan Rustiadi
 Penerbit : LIPI Press
 Edisi : Soft Cover
 ISBN 13 : 9789792572582
 Tahun terbit : 2010
 Bahasa : Inggris
 Jumlah halaman : 272
 Ukuran : 160x240 mm

Buku ini terdiri atas tulisan ilmiah terpilih yang dipaparkan oleh Institut Internasional pada pelaksanaan IRSA ke-2 yang dilaksanakan di Bogor 21-23 juli 2009. IRSA adalah kependekan dari Indonesia *Regional Science Association*, yaitu pertemuan ilmiah tahunan yang diadakan sejak tahun 1998.

Menurut beberapa futuris, Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang berpengaruh, termasuk di dalamnya negara China, India, dan Brazil. Perkiraan ini berdasar pada kecenderungan pembangunan yang mengarah kepada peningkatan kualitas sosial, politik, dan ekonomi. Secara sosial misalnya, menurunnya konflik sosial baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara politik, praktek demokrasi di Indonesia mulai diperhatikan dunia internasional. Terakhir secara ekonomi, Indonesia mampu mengatasi dampak krisis ekonomi global. Namun demikian, prediksi tersebut tidak bisa didapatkan begitu saja melainkan harus diusahakan dengan gigih agar prediksi itu menjadi kenyataan. Masalahnya, saat ini terdapat beberapa hal yang cukup menghambat pembangunan bangsa yang kuat, di antaranya adalah separatisme, dan anti keberagaman. Kualitas pertumbuhan politik dan ekonomi juga masih dihantui bayang-bayang korupsi yang sulit diberantas.

Studi yang dilakukan oleh Hill Resosudarmo dan Vidyattama (2008) menyimpulkan tiga poin penting mengenai permasalahan di Indonesia secara lebih komprehensif. Pertama, terjadi perbedaan besar pada *outcome* bidang ekonomi dan sosial, karena konsentrasi aktivitas ekonomi masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera. Yang Kedua, disparitas regional masih terlihat tajam. Dan yang terakhir, provinsi-

provinsi terbaik dapat dilihat dari lokasi, luas daerah, dan karakteristik social ekonomi. Dapat dilihat bahwa provinsi yang memiliki performa terbaik, adalah yang paling “terkoneksi” kepada ekonomi global.

Selain itu, pembangunan daerah di Indonesia masih terhambat dengan terbatasnya kapasitas pendukung sumber daya alam yang menyebabkan bencana berkelanjutan. Saat ini, kondisi pulau Jawa dan Bali mengalami defisit ekologis. Pulau Jawa, di satu sisi adalah pusat pertumbuhan ekonomi nasional, namun Jawa juga sedang menghadapi masalah serius terutama degradasi lingkungan dan kapasitas pendukung yang over-explored. Oleh karena itu, pulau Jawa menghadapi tekanan ekologis yang menyebabkan bencana seperti tanah longsor dan banjir.

Buku ini terdiri atas tulisan ilmiah terpilih yang dipaparkan oleh Institut Internasional pada pelaksanaan IRSA ke-2 yang dilaksanakan di Bogor 21-23 juli 2009. IRSA adalah kependekan dari Indonesia *Regional Science Association*, yaitu pertemuan ilmiah tahunan yang diadakan sejak tahun 1998. Pertemuan IRSA membahas beragam tema yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan pembangunan daerah di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, IRSA mengangkat tema “Politik Ekonomi pada Pembangunan Daerah”. Pertemuan ini dihadiri lebih dari 200 peserta dari 12 negara, dan mendiskusikan lebih dari 100 paper.

Makalah yang dimuat di dalam buku ini sebagian besar telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Pembahasan yang diangkat dalam makalah tersebut adalah hasil penelitian atas 3 isu besar dalam masalah pembangunan wilayah di Indonesia yaitu kemiskinan, pengangguran, disparitas, dan keberlanjutan; politik ekonomi dalam pembangunan wilayah misalnya penataan ruang dan kebijakan fiskal; dan prospek dari pembangunan wilayah misalnya optimalisasi kerjasama dan sumber potensial daerah.

Setelah membaca buku ini, dapat diketahui bahwa masalah pembangunan wilayah di Indonesia sangat beragam. Setiap daerah memiliki potensi dan masalah yang khusus. Kepala Bappenas, dalam pengantar pada buku ini mengatakan bahwa ia berharap agar setiap daerah dapat mengidentifikasi dan mengeksplor potensi dan masalah di daerahnya masing-masing. Dengan cara ini, setiap daerah dapat saling melengkapi, dan bersinergi. Tujuan utama pembangunan daerah adalah adanya kekuatan ekonomi yang terintegrasi.

Pembahasan yang diangkat dalam paper-paper tersebut adalah hasil penelitian atas tiga isu besar dalam masalah pembangunan wilayah di Indonesia yaitu kemiskinan, pengangguran, disparitas, dan keberlanjutan

Adapun judul-judul paper yang masuk ke dalam buku ini, adalah:

Part I: Problems of Regional Development: Poverty, Unemployment, Disparities, and Sustainability

1. Regional Development in Indonesia: Problems, Policies, and Prospects
 2. Java Island: Regional Disparity and Sustainability Perspectives
 3. Investigating the Economic Growth Impact on Poverty Reduction in East Java
 4. Poverty as Child Labour Internal Migration's Determinant
 5. Regional Persistent Unemployment in Indonesia
- Part II: Political Economic of Regional Development: Spatial Planning and Fiscal Policies
6. Politics of Local Budgeting: The Main Hurdle for Stimulus Efficacy
 7. Reconciling Industrial Cluster and Urban System Through Regional Network Governance
 8. Decentralization and Its Impact on Primary Education Outcomes
 9. Fiscal Decentralization and Regional Disparities in Indonesia: Dynamic Panel Data Evidence
- Part III: Prospect of Regional Development:

- Optimizing Partnership and Local Potential Resources
10. Promoting and Sustaining Multi-Stakeholder's Process to Make Local Governance Works for Poverty Reduction In Less Developed Region: The Case of Nusa Tenggara Barat
11. Large-Small Industry Contracting and Regional Development: The Case of Mitra Produksi Sigaret (MPS)—PT. HM Sampoerna
12. The Roles of Agroindustries in Regional Economic Development: A Case Study in South Kalimantan

A portrait of Ir. Harris Hasudungan Batubara, M.Eng.Sc. He is an older man with short, graying hair, wearing a traditional Indonesian batik shirt with a complex, colorful pattern. He is looking slightly to the right of the frame with a thoughtful expression. The background is blurred, showing what appears to be an indoor setting with other people and lights.

Selama Pra Konsultasi Regional, Telah Terjadi Interaksi dan Koordinasi

Ir.Harris Hasudungan Batubara,M.Eng.Sc

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur BPIW

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), sejak awal hingga akhir Februari, menyelenggarakan Pra Konsultasi Regional atau biasa disebut Pra Konreg di empat kota besar di Indonesia, yakni Medan, Yogyakarta, Denpasar, dan Makassar. Tujuan diadakannya Pra Konreg salah satunya adalah identifikasi awal isu-isu strategis bidang PUPR tahun 2017 sebagai bahan

masukannya Konreg yang akan dilaksanakan Maret. Seperti apa hasil dari pelaksanaan Pra Konreg dan apa yang akan dipersiapkan sebelum pelaksanaan Konreg?. Berikut wawancara Sinergi dengan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur BPIW Kementerian PUPR yang juga Ketua Panitia Pelaksana Pra Konreg, Ir.Harris Hasudungan Batubara,M.Eng.Sc, di sela-sela Pra Konreg di Makassar, 26 Februari lalu.

Sebenarnya apa esensi dari Pra Konreg?

Jadi Pra Konreg kita lakukan sesuai dengan amanat Renstra Kementerian PUPR 2015-2019. Dalam Renstra dikatakan bahwa keterpaduan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi investasi. Atas dasar itu kita coba mendisain, bagaimana caranya agar apa yang diamanatkan oleh Renstra dapat diwujudkan. Kalau kita bicara PUPR, sektornya ada beberapa, ada sektor Sumber Daya Air, Bina Marga atau penyelenggaraan jalan, ada sektor Keciaptakarya, dan ada sektor Perumahan. Program-programnya harus kita padukan.

Untuk memadukannya kembali kepada apa yang diamanatkan Renstra itu, bahwa Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah pertumbuhan. Wilayah pertumbuhan itu ada wilayah yang sudah berkembang, sedang berkembang, dan ada wilayah pengembangan baru. Kemudian kita bagi dalam 35 wilayah pertumbuhan yang disebut Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS. Di dalam wilayah-wilayah pertumbuhan itu ada kawasan-kawasan, seperti kawasan pelabuhan, industri, pariwisata, dan perkotaan.

Economy activity ada di wilayah-wilayah pertumbuhan itu, dan bisa berfungsi sebagai pusat produksi, sebagai pusat pengolahan, dan juga sebagai pusat-pusat perdagangan. Disitulah kita ingin memadukan infrastruktur melalui sektor PUPR yang ada ini. Tapi pembangunan infrastruktur bukan konsentrasi di situ saja, tapi perlu tentunya pembangunan infrastruktur antar kawasan perlu dan antar wilayah pertumbuhan juga perlu. Atas dasar itu kita membuat Pra Konsultasi Regional seperti apa yang kita lakukan sekarang ini. Kalau dulu Pra Konsultasi Regional dilakukan masing-masing sektor. Sehingga terlihat dari situ kurang ada komunikasi, kurang ada interaksi, kurang ada koordinasi antara sektor yang satu dengan sektor yang lain.

Sekarang dengan adanya amanat dari Renstra itu kita coba Pra Konsultasi Regional itu, kita lakukan dalam *desk-desk*, untuk masing-masing provinsi. Didalamnya ada Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan ada Perumahan. Dalam *desk* ini kita harapkan ada komunikasi, ada koordinasi, dan ada interaksi. Sehingga bisa terjalin keterpaduan perencanaan tadi maupun sinkronisasi. Itu esensi dasar, sehingga Pra Konreg itu kita lakukan seperti ini, jadi agak berbeda dengan apa yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya.

Apakah dengan cara seperti ini lebih sistematis?

Disamping sistematis, kita mengupayakan adanya koordinasi dari masing-masing sektor yang ada. Khususnya di Kementerian PUPR. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, koordinasi ini perlu mensinkronkan program Kementerian PUPR dengan program-program daerah sendiri. Di sini kita undang Kepala Bappedanya, kita undang dinas-dinas terkait, apakah Cipta Karya, Bina Marga, Perumahan, maupun Sumber Daya Air, sehingga harapan kita ada komunikasi program dari pemerintah pusat atau program Kementerian PUPR dengan program-program daerah, baik provinsi

maupun kabupaten. Untuk kabupaten melalui dinas-dinas yang ada dan melalui Bappeda.

Dari empat kali Pra Konreg, apa yang telah dihasilkan?

Jadi dari pengalaman yang sudah kita lakukan dari empat Pra Konreg yang berbasis pulau dan kepulauan ini, interaksi dan koordinasi sudah terjadi. Bahkan ada program-program yang dibutuhkan untuk didukung sektor lain disini kita padukan. Itu hasil yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa teman-teman dari masing-masing satminkal yang ada, melihat arah

program kerjanya. Kalau ada program kerja di suatu kawasan yang berhubungan dengan satminkal lain, maka program kerja tersebut dipadukan. Sehingga investasi PUPR ini lebih efisien dalam rangka menghidupkan aktivitas ekonomi maupun aktivitas lain dari kawasan-kawasan yang ada.

Seperti apa evaluasi dari pelaksanaan Pra Konreg?

Jadi kalau evaluasi secara keseluruhan belum, tapi parsial evaluasi sudah kita lakukan. Pertama dari sisi penyelenggaraan, baik peserta maupun kita sendiri sebagai panitia, karena memang kegiatan baru pertama kali ini tentunya ada yang perlu kita perbaiki, misalnya dari sisi absensi, penyediaan keuangan, akomodasi, dan dari sisi penyediaan konsumsi. Termasuk juga penyediaan beberapa petugas desk untuk masing-masing provinsi. Seperti di Medan melibatkan 11 provinsi. Kalau masing-masing desk itu ada beberapa petugas yang kita harus siapkan seperti petugas MC, absensi, notulen, asisten, operator, dan ada juga petugas penyediaan peralatan-peralatan. Kita perlu penajaman-penajaman dari tugas masing-masing, karena kita baru pertama kali sebagai panitia Pra Konreg.

Dalam *desk* ini kita harapkan ada komunikasi, ada koordinasi, dan ada interaksi. Sehingga bisa terjalin keterpaduan perencanaan tadi maupun sinkronisasi. Itu esensi dasar, sehingga Pra Konreg itu kita lakukan seperti ini, jadi agak berbeda dengan apa yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya.



“Masing-masing sektor sudah punya *planning* mengenai kriteria mana yang akan dilakukan, dengan tata cara penilaian masing-masing. Ini sebetulnya bagaimana menghimpun hal itu untuk kita letakkan dititik yang sama”

Apa masukan untuk daerah terkait penyusunan program 2017?

Selama ini ketika mereka melihat sektornya sendiri, tidak terjadi perbedaan yang sangat signifikan, karena tinggal menentukan soal di mana akan meletakkan infrastruktur, apakah dititik A atau di B. Jangan sampai yang satu meletakkan dititik A, yang satu dititik B, yang satu lagi di C, dan yang lain di D. Padahal ini membutuhkan dukungan-dukungan. Itu saja poinnya.

Apakah usulan program 2017 disaring dulu sebelum masuk ke Konreg?

Jadi masing-masing sektor sudah punya *planning* kriteria, mana yang akan dilakukan dengan tata cara penilaian masing-masing. Ini sebetulnya bagaimana menghimpun itu untuk kita letakkan dititik

yang sama. Contoh ada perumahan yang ingin membangun rumah susun di titik A. Tapi pada tahun yang sama, program dari Cipta

Karya menyediakan air bersih di titik B, ini berarti tidak sinkron. Kalau kondisi seperti ini, bagaimana kita ajak Cipta Karya, misalnya, menggeser program penyediaan airnya di titik A. Sehingga bila rumah susun itu selesai, suplai air bersihnya sudah ada.

Begitu juga dari sektor lain, misalnya persampahan. Contohnya ada kawasan yang ingin dibangun dengan skala besar, yang membutuhkan pengolahan sampah, yang tadinya misalnya pengolahan sampah di titik B, bagaimana ini kita geser ke titik A. Karena masing-masing sektor

punya kriteria, punya metode evaluasi, dan juga prioritas dari sektornya masing-masing.

Jadi dari pengalaman yang sudah kita lakukan dari empat Pra Konreg yang berbasis pulau dan kepulauan ini, interaksi dan koordinasi sudah terjadi. Bahkan ada program-program yang dibutuhkan untuk didukung sektor lain

Setelah Pra Konreg akan dilaksanakan Konreg. Seperti apa gambaran pelaksanaan Konreg Maret ini?

Jadi perbedaan dari Pra Konreg dan Konreg adalah, kalau Pra Konreg kita mendapatkan *long list* atau banyak masukan, yang kita dapatkan dari diskusi dan dari koordinasi, dengan rekan-rekan satminkal lain. *Long list* ini berdasarkan kriteria. *Long list* ini sebenarnya cerminan dari need atau kebutuhan. Pada waktu Konreg ada ukuran konkrit yakni soal budget. Dari *long list* tadi kita seleksi dan membuat *short list* atau beberapa masukan dari kebutuhan yang ada. Itu inti dasar perbedaan Pra Konreg dan Konreg.

Apakah *short list* itu menjadi program 2017 yang nanti ditetapkan dalam Konreg?

Jadi nanti setelah Konreg kita bisa membuat *short list*, itulah menjadi cikal bakal Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga atau RKAKL, itulah cikal bakal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA, dan cikal bakal dari apa yang mau kita lakukan pada tahun berikutnya. Harapan ke depan sistem ini semakin dikenal oleh teman-teman, dan nantinya koordinasi akan lebih mudah, sehingga pada akhirnya

investasi infrastruktur PUPR lebih efisien dan lebih efektif.

Bila ada nanti yang diundang dari kalangan eksternal PUPR, seperti misalnya dari DPR RI, apakah masukan yang diberikan juga dapat masuk dalam penyusunan program 2017?

Mungkin siapa yang hadir di Konreg saya belum bisa sampaikan sekarang, karena pimpinan Kementerian yang menentukan siapa yang hadir. Karena di Konreg itu sendiri ada panel, itu permasalahan umum yang dibicarakan, kemudian ada juga desk seperti ini. Tapi mungkin basisnya nanti basis satminkal untuk menajamkan apa yang diperoleh dari Pra Konreg.

Apa yang diharapkan dari pelaksanaan Konreg?

Konreg itu tujuannya untuk menyeleksi dari *long list* menjadi *short list* sehingga nanti pada waktu kita menyeleksi didasarkan pada kriteria prioritas, itu yang utama. Sama seperti dengan apa yang dilakukan seorang ibu rumah tangga yang membuat kebutuhan rumahtangga, seperti itu yang dimaksud dengan *long list*. Nanti suaminya menyeleksi berdasarkan dana yang ada dan juga tingkat kebutuhan, mana yang perlu dibeli dan mana yang tidak. Seperti itu juga dalam organisasi besar seperti Kementerian PUPR ini. Kita berharap adanya keterpaduan, dan keterpaduan ini tetap terus dilakukan.

Dengan adanya Pra Konreg dan Konreg, apakah keterpaduan antar sektor akan lebih baik?

Tentunya kita menuju ke situ dari awal ada desk provinsi, sehingga keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program bisa terjalin. Menuju keterpaduan yang lebih baik seperti yang diamanatkan Renstra Kementerian PUPR. **Hendra Djamal**

Long list ini sebenarnya cerminan dari need atau kebutuhan. Pada waktu Konreg ada ukuran konkrit yakni soal budget. Dari long list tadi kita seleksi dan membuat short list atau beberapa masukan dari kebutuhan yang ada. Itu inti dasar perbedaan Pra Konreg dan Konreg.

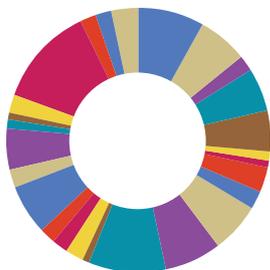
menyeleksi didasarkan pada kriteria prioritas, itu yang utama. Sama seperti dengan apa yang dilakukan seorang ibu rumah tangga yang membuat kebutuhan rumahtangga, seperti itu yang dimaksud dengan *long list*. Nanti suaminya menyeleksi berdasarkan dana yang



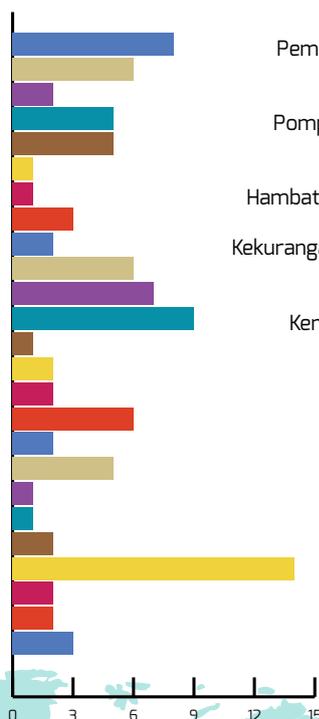
Kementerian PUPR Dalam Media Cetak

Kami membuat guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengannya. Guntingan berita kami sarikan dari 7 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Koran SINDO, Investor Daily, Republika, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini adalah rangkuman pemberitaan mengenai infrastruktur dan yang berkaitan, selama bulan Februari 2016. Total ada 312 berita dari 7 media koran periode 1 Februari – 29 Februari 2016.

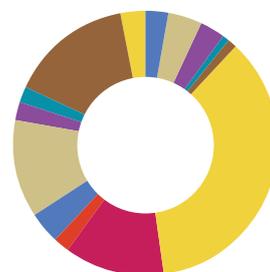
Berita Positif



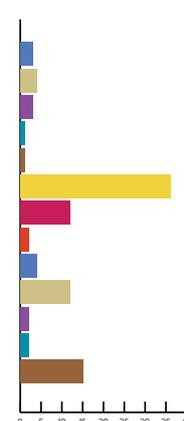
Pembuatan dan pengembangan Jalan = 13, 8%
Mendukung Pariwisata = 9, 6%
Fungsi Sosial di Sempadan sungai = 3, 2%
Mendukung Olimpiade Asia = 7, 5%
Pengembangan rusun = 10, 5%
Restorasi sungai = 2, 1%
Relokasi rusun = 2, 1%
Pembiayaan Infrastruktur Dibuka bagi Asing = 6, 3%
Penyerapan Anggaran = 5, 2%
UU Tapera = 11, 6%
Pendanaan pembangunan infrastruktur = 14, 7%
Memperkuat pembangunan ekonomi = 17, 9%
Membantu Penyerapan tenaga kerja = 2, 1%
Tarif Tol/Jembatan Turun = 3, 2%
Mengatasi Ketimpangan = 3, 2%
Permintaan membangun/memperbaiki jalan = 11, 6%
Dukungan kepada KEK = 4, 2%
Lain-lain = 10, 5%
Program Sejuta Rumah = 1, 1%
Pembangunan di Perbatasan = 2, 1%
Sanitasi = 5, 2%
Jalan Tol = 27, 14%
Proyek Tol Batal = 5, 2%
Smart City = 3, 2%
Waduk = 6, 3%



Berita Negatif



Pembangunan terbengkalai = 2, 3%
Jembatan Ambruk = 3, 4%
Korupsi = 2, 3%
Pompa Air diganggu sampah = 1, 1%
Pemberhentian proyek = 1, 1%
Banjir = 26, 36%
Hambatan pembebasan lahan = 9, 12%
Desa yang Terisolasi = 1, 2%
Kekurangan Dana Pembangunan = 3, 4%
Ruang Terbuka Hijau = 9, 12%
Tanggul Jebol = 1, 2%
Kemacetan Semakin Parah = 1, 2%
Jalan Rusak = 11, 15%
Kekeringan = 2, 3%





244 BERITA Tentang PUPR

Berita menarik:

- **Harapan Ekonomi Membaik** (Koran Investor Daily, Halaman 11; Sabtu 06 Februari 2016)
Tahun baru 2567 dalam penanggalan masyarakat Tionghoa atau Tahun Baru Imlek yang dimulai pada Senin (8/2) mendatang diyakini akan membawa harapan baru bagi perekonomian Indonesia. Ada harapan besar untuk perbaikan perekonomian di Tanah Air melalui berbagai upaya yang tengah digalakkan pemerintah. Sektor yang menonjol ini adalah infrastruktur terutama kelistrikan, dan jalan tol.
- **Enam Desa di Ende masih Terisolasi** (Koran – Media Indonesia, Halaman 22; Sabtu 06 Februari 2016)
Desa Ngalukoja di Kecamatan Maurole serta lima desa di Kecamatan Kota Baru, yakni Nuanaga, Rangalaka, Tou Barat, Loboniki, dan Niopanda, terisolasi karena akses ke kecamatan dan ke desa lainnya terputus.
- **Kerusakan Pantura Ganggu Ekonomi** (Koran – Sindo, Halaman 14; Selasa 16 Februari 2016)
Infrastruktur jalan sangat penting dalam distribusi barang, baik itu bahan baku maupun hasil industri dari dan menuju Semarang. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah khawatir kerusakan jalan di jalur Pantura mulai dari Brebes hingga Rembang akan mengganggu distribusi barang.
- **Keluar dari Ancaman Negara Gagal** (Koran – Kompas, Halaman 5; Selasa 16 Februari 2016)
Indonesia tahun 2045 telah mampu keluar dari ancaman negara gagal. Saat itu Indonesia telah menjadi negara industri yang cukup maju dengan struktur ekonomi belah ketupat. Dalam segi infrastruktur pemerintah memacu pembangunan infrastruktur untuk menarik investasi berkualitas yang menciptakan lapangan kerja sehingga kesenjangan pendapatan bisa dikurangi.
- **Ahok Batalkan Proyek Tol Dalam Kota** (Koran – Tempo, Halaman 6; Kamis 18 Februari 2016)
Gubernur DKI Jakarta membatalkan pembangunan enam ruas tol dalam kota. Dengan rute yang sama, ia akan mengubahnya menjadi jalan arteri agar menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- **Infrastruktur: Pemerintah Memperbanyak Jembatan Gantung** (Koran – Kompas, Halaman 19; Kamis 18 Februari 2016)
Masyarakat di daerah pedesaan masih sangat membutuhkan akses penghubung antardesa. Terkait dengan itu, pemerintah berencana memperbanyak pembangunan jembatan, terutama jenis jembatan gantung, di daerah terpencil.
- **Pemerintah Segera Bentuk Badan Otorita Pariwisata** (Koran – Tempo, Halaman 15; Senin 22 Februari 2016)
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan pihaknya akan segera membentuk badan otorita untuk mengelola 10 destinasi wisata baru. Destinasi-destinasi tersebut ditargetkan menjadi “Bali baru” sebagaimana dicanangkan Presiden Joko Widodo. Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan akan turut mendukung pengembangan 10 destinasi wisata baru itu.
- **Kepercayaan pada Infrastruktur Tinggi** (Koran – Kompas, Halaman 20; Selasa 23 Februari 2016)
Program infrastruktur yang didorong pemerintah disambut dengan kepercayaan lembaga pembiayaan untuk mengucurkan pinjaman. PT. Indonesia Infrastructure Finance kembali mendapatkan fasilitas pembiayaan sindikasi 150 juta dollar AS.

Bappeda Kabupaten Trenggalek Kunjungi BPIW

Terkait Tindak Lanjut Usulan Pembangunan Infrastruktur



Kepala BPIW, Hermanto Dardak Memimpin Rapat Koordinasi dengan Bappeda Trenggalek Sumber: Dok BPIW

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Nung Isnaini beserta jajarannya melakukan kunjungan ke Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Senin (1/2). Nung menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan untuk menanyakan secara langsung tindak lanjut dari usulan pembangunan beberapa

infrastruktur di Kabupaten Trenggalek.

Usulan ini telah disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek melalui surat resmi ke BPIW beberapa waktu yang lalu. Saat melakukan pertemuan dengan Kepala BPIW Hermanto Dardak tersebut, Nung mengatakan beberapa pembangunan yang diusulkan untuk dibangun di Trenggalek yakni Bendungan Bagong, perbaikan irigasi dan geometrik jalan di sekitar Lingkar Wilis, pembangunan Jembatan Gantung di Margomulyo, penataan kawasan kumuh dan pembangunan rusunawa di daerah Watulimo.

Menanggapi hal itu, Dardak mengatakan bahwa kegiatan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) dapat menjadi momen yang tepat bagi Pemerintah Daerah khususnya



Suasana Rapat Koordinasi dengan Bappeda Trenggalek

Sumber: Dok BPIW

Kabupaten Trenggalek untuk menyampaikan apa saja program pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2017 mendatang. Infrastruktur yang menjadi prioritas.

“Kabupaten Trenggalek dapat menghadiri Pra Konreg untuk daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa yang diadakan pada tanggal 11-12 Februari 2017 di Yogyakarta,” ungkap Dardak.

Dari beberapa usulan tersebut, Dardak menilai pengembangan kawasan Panggul – Prigi – Trenggalek – Tulungagung berpotensi menjadi satu kesatuan kawasan yang terintegrasi, karena lokasinya yang

saling berhimpitan, memiliki kesamaan karakter ekonomi, dan kesamaan lingkup

pengaruh ekonomi. Untuk kawasan tersebut menurutnya akan difokuskan sebagai inkubasi wisata pantai dan agrowisata.

“Pembangunan infrastruktur di daerah

“Pembangunan infrastruktur di daerah Panggul menuju Prigi diprioritaskan di tahun 2017 mengingat daerah tersebut memiliki potensi yang besar terutama untuk kawasan pantai. Sehingga harus ada akses yang baik dari selatan ke utara. Koordinasikan dengan Perhutani dalam hal pembebasan lahan,” tutur Dardak.

Panggul menuju Prigi diprioritaskan di tahun 2017 mengingat daerah tersebut memiliki potensi yang besar terutama untuk kawasan pantai. Sehingga harus ada akses yang baik dari selatan ke utara. Koordinasikan dengan Perhutani dalam hal pembebasan lahan,” tutur Dardak.

Terkait dengan masalah geometrik jalan di kawasan Lingkar Wilis, Dardak mengatakan saat

ini sedang dilakukan studi di Balai Jalan mengenai studi Lingkar Wilis di koridor WPS

Yogyakarta – Prigi – Blitar – Malang. Studi ini dilakukan untuk memperbaiki geometrik jalan, agar jalan yang dibangun tidak terlalu menanjak.

Menanggapi pengembangan kawasan Prigi, menurut Nung, sesuai arahan Bupati Trenggalek terpilih, hal itu akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, terutama menyangkut rencana pembangunan pelabuhan di Prigi. Pelabuhan tersebut dibangun untuk meningkatkan konektivitas Wilayah Lingkar Wilis dan sekitarnya. **Naufal/infoBPIW**

BPIW Kembali Lakukan Koordinasi dengan World Bank

Terkait Pengembangan Tiga Kawasan Wisata



Kepala BPIW, Hermanto Dardak dan Tim Leader World Bank, Bertien dalam Rapat Koordinasi Sumber: Dok BPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali melakukan koordinasi dengan World Bank terkait pengembangan tiga kawasan wisata, yakni Tanjung Lesung di Provinsi Banten, Danau Toba di Sumatera Utara dan Mandalika di Lombok. Rapat koordinasi yang dilakukan di ruang pertemuan BPIW, Selasa (16/2), dipimpin langsung Kepala BPIW Hermanto Dardak.

Dardak menjelaskan tiga kawasan wisata tersebut merupakan bagian dari 10 Kawasan

Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang akan dijadikan sebagai "10 New Bali". Selain itu pengembangan kawasan wisata tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mencapai target jumlah wisatawan mancanegara sebesar 20 juta orang pada tahun 2019 mendatang.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri eselon II dan III BPIW serta tim dari World Bank tersebut, Dardak menjelaskan upaya yang akan dilakukan dalam mencapai target kunjungan wisatawan adalah mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah, membangun kapasitas sumber daya pariwisata, pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM), pembangunan infrastruktur dan pengembangan kelembagaan di kawasan pariwisata tersebut.

"Pengembangan kawasan pariwisata tentu saja memiliki beberapa tantangan, seperti bagaimana mengintegrasikan dan meningkatkan infrastruktur yang dapat mengembangkan potensi daerah," tutur Dardak. Pembangunan infrastruktur pada 10 KSPN tersebut menurutnya perlu mempersiapkan beberapa hal, seperti kriteria terkait investasi untuk pembangunan



Suasana Rapat Koordinasi BPWI dan World Bank terkait 10 KSPN

Sumber: Dok. BPIW

infrastruktur pariwisata, penyusunan studi kelayakan, *Environmental Impact Assesment* (EIA), *Detail Engineering Design* (DED) dan pembebasan lahan.

Selain itu perlu disiapkan pembiayaan untuk pembangunan fisik serta kemitraan dengan pihak swasta, termasuk perusahaan milik negara seperti BUMN dan BUMD. Khusus kawasan wisata Danau Toba dan Mandalika yang merupakan juga bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), akan dilakukan kesepakatan antara pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi dan kota, termasuk juga pihak swasta dan juga masyarakat. Kesepakatan itu untuk menentukan beberapa hal seperti obyek yang diprioritaskan serta identifikasi

kebutuhan infrastruktur. Identifikasi ini terutama terkait bandara, jalan, air, sanitasi, drainase, listrik, ruang terbuka hijau dan anjungan cerdas.

Tim leader dari World Bank, Bertien menambahkan dalam pengembangan KSPN ini perlu dilakukan koordinasi dan integrasi antar kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kemenko Maritim dan Sumber Daya, dan Kemenko Perekonomian.

Dalam rencana pengembangan kawasan Danau Toba, Tanjung Lesung dan Mandalika, menurut Bertien, dalam waktu dekat World Bank akan meninjau langsung

tiga kawasan wisata tersebut. Setelah dilakukan kunjungan tersebut, World Bank akan melakukan technical meeting dengan beberapa Kementerian terkait, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, dan Bappenas.

Naufal/InfoBPIW

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri eselon II dan III dari BPIW serta tim dari World Bank tersebut, Dardak menjelaskan upaya yang akan dilakukan dalam mencapai target kunjungan wisatawan, yakni mengintegrasikan perencanaan pembangunan

Menteri PUPR Lantik Hermanto Dardak Sebagai Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia



Ketua Umum PII, Hermanto Dardak saat memberika sambutan

Sumber: Dok. BPIW

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (PII) beserta pengurus lainnya, di Auditorium PUPR, Selasa malam (16/2).

Usai melakukan pelantikan disertai

pembacaan Kode Etik Insinyur Indonesia atau “Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia”, Basuki berharap pengurus PII periode 2015-2018 ini dapat meningkatkan jumlah peminat yang ingin mendapatkan gelar insinyur di setiap Perguruan Tinggi. Tidak hanya itu Basuki juga berharap PII juga dapat lebih meningkatkan kualitas para insinyur di tanah air. Apalagi saat ini program kerja Kabinet Kerja difokuskan pada pembangunan infrastruktur baik di bidang PUPR, juga infrastruktur terkait ketahanan pangan, sumber daya alam dan gas, pariwisata, dan telekomunikasi.

Ditambah lagi, saat ini merupakan era kompetensi dengan para ahli dari luar negeri setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Disinilah PII berperan. Oleh karenanya PII harus ada strategi dalam rangka meningkatkan kualitas insinyur di Indonesia dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Kita dalam era kompetensi dengan para ahli

dari luar negeri,” ucap Basuki.

Lebih lanjut Basuki menjelaskan saat ini Kementerian PUPR sedang mengerjakan pembangunan dan renovasi infrastruktur yang cukup mendesak untuk persiapan Asian Games, yakni renovasi *venue* di Geloro Bung Karno (GBK) dan pembangunan perkampungan atlet, di Kemayoran Jakarta

pemerintah, PII senantiasa memberikan masukan yang akan menjadi nilai tambah baik yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. “Dalam era kompetisi saat ini dukungan profesionalisme insinyur diperlukan, agar semua kawasan di Indonesia semakin kompetitif untuk menghadapi MEA

kegiatan alih sistem dari para ahli engineer di Australia. “Pada waktu itu kita melakukan survei dan mempertimbangkan bahwa sistem dari para ahli di Australia diakui lebih 30 negara, model yang diterapkan mereka sesuai dengan yang sudah dilakukan seorang insinyur. Sertifikasi ini sudah diakui di ASEAN (Association of Southeast Asian

Nations ,red) dan APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation,red). Ini modal awal PII dan tinggal proses administrasi saja dari pengakuan itu,” ungkap Dardak.

Saat ini organisasi yang telah berusia 64 tahun ini telah dipayungi oleh Undang-Undang No.11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Dengan undang-undang tersebut ia berharap dapat meningkatkan profesionalisme 750 ribu insinyur di Indonesia. Dardak juga menyatakan dirinya akan berupaya meningkatkan jumlah insinyur di Indonesia agar dapat memberikan

Sumber: Dok. BPIW

kontribusi bagi pembangunan nasional. Sebelum acara pelantikan Pengurus Pusat, sebagai Ketua Umum PII, Hermanto Dardak melantik pengurus Badan Kejuruan Teknik Sipil, Badan Kejuruan Teknik Fisika, Badan Kejuruan Teknik Industri, serta insinyur profesional. **Hendra/infBPIW**



Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono Melantik Ketua Umum PII, Hermanto Dardak beserta jajaran

dan Jaka Baring Palembang. Basuki optimis dapat mencapai target penyelesaiannya proyek tersebut pada akhir 2017 mendatang, karena mendapat dukungan tenaga ahli yang handal baik dari PII maupun dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). “Keinginan Presiden jelas, kondisi GBK akan yang lebih baik setelah di rekonasi, untuk 25 hingga 50 tahun ke depan,” ungkap Basuki.

Hermanto Dardak dalam kata sambutannya menyatakan sebagai mitra

tersebut,” tutur Dardak.

Terkait MEA menurut Dardak, PII sudah

“PII harus ada strategi dalam rangka meningkatkan kualitas insinyur di Indonesia dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Kita dalam era kompetensi dengan para ahli dari luar negeri,” ucap Basuki.

melakukan persiapan sejak tahun 1995, di mana pada saat itu PII memiliki tim sertifikasi insinyur yang profesional yang melakukan

Hermanto Dardak Paparkan Rencana Percepatan Pembangunan Di Depan Investor Pasar Modal

Kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak memaparkan rencana percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya terkait infrastruktur didepan para investor pasar modal dalam acara Market Outlook 2016, di Jakarta, Selasa (23/2). Acara yang diselenggarakan tiap tahun oleh Panin Asset Management ini bertujuan untuk memberikan edukasi, ulasan dan prediksi keadaan pasar tahun berjalan, kepada para pelaku pasar modal tersebut.

Dalam acara ini Hermanto menjelaskan terkait tantangan pembangunan infrastruktur Indonesia. Dikatakannya, saat ini Indonesia dihadapkan pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Disaat yang sama pula infrastruktur dipacu untuk memiliki daya saing. Tantangan lain menurut Dardak adalah terkait disparitas antar wilayah, terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). "Kita melihat Pulau Jawa dan Sumatera masih menjadi yang terdepan, dalam arti hanya dengan luas lahan 30%,



Kepala BPIW, Hermanto Dardak Paparan Tentang Market Outlook

Sumber: Dok. BPIW

namun ekonominya mencapai lebih dari 80% dan infrastrukturnya relatif lebih baik dibanding kawasan di luar Jawa dan Sumatera, yang luasnya sekitar 70% dari lahan nasional kita," ujar Dardak. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan di KTI tersebut.

Tantangan lainnya adalah di bidang

pariwisata, dimana Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Solsui yang dikeluarkan pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut adalah dengan menetapkan 10 prioritas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang menjadi fokus pembangunan bidang pariwisata dalam 5 tahun ke depan. Dengan menetapkan 10 prioritas KSPN ini akan dibangun



Suasana Seminar Panin Asset Management di Jakarta

Sumber: Dok BPIW

infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di kawasan tersebut. Pembangunan infrastruktur menurutnya dibangun terpadu untuk menghasilkan outcome dan impact, agar bisa memacu pertumbuhan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. "Ini menekankan kepada kita, bagaimana infrastruktur yang belum selesai, kita tuntaskan," tegas Dardak.

Urbanisasi juga menjadi tantangan yang di hadapi saat ini. Dalam empat dekade terakhir jumlah penduduk di perkotaan meningkat enam kali lipat. Jika pembangunan infrastruktur tidak bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan tingkat pertumbuhan maka kemacetan akan terjadi di wilayah tersebut. Sehubungan dengan itu menurut Dardak tahun ini, Kementerian PUPR akan meningkatkan kapasitas infrastruktur secara nasional baik jalan, waduk, pemukiman maupun perumahan. Hal

ini difokuskan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan.

Dalam era kompetitif ini menurut Dardak pemerintah dituntut untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan itu. Agar pembangunan bisa berjalan dengan baik, pemerintah juga perlu dukungan dari sektor bisnis. "Kita terus mengupayakan agar infrastruktur dipacu untuk bisa menarik investor," tambah Dardak.

Dengan menetapkan 10 prioritas KSPN ini akan dibangun infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di kawasan tersebut.

Saat ini menurutnya kawasan Pasifik merupakan pusat perekonomian dengan prospek pertumbuhan tertinggi. Hal tersebut baginya merupakan peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan siklus global yang masuk ke Indonesia.

Market Outlook merupakan acara yang secara rutin di gelar oleh Panin Asset

Management yang merupakan sebuah perusahaan pengelola reksa dana di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1997 dan saat ini mengelola 15 reksa dana aktif. Melihat program pemerintah beberapa tahun kedepan sangat fokus untuk pembangunan infrastruktur sehingga Panin Asset Management berencana untuk berinvestasi pada sektor infrastruktur melalui penerbitan danareksa. **Andina/infoBPIW**

Kementerian PUPR Dukung Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung



Kepala BPIW, Hermanto Dardak (dua dari kiri) mewakili Menteri PUPR dalam SISLOGNAS

Sumber: Dok BPIW

Pelabuhan Bitung telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Hub Internasional melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Pelabuhan Bitung dapat menjadi pintu gerbang utama di wilayah timur Indonesia di masa depan. Sehubungan dengan hal itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) Bitung dengan pembangunan jalan tol Manado menuju Bitung sepanjang 39 kilometer sebagai infrastruktur penunjang.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak yang hadir mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam diskusi Sosialisasi Kebijakan Pengembangan



Menko Perekonomian, Darmin Nasution bersama Kepala BPIP, Hermanto Dardak meninjau pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung

Sumber: Dok BPIP

Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian di Manado, Kamis (25/2).

Dukungan lain yang dilakukan Kementerian PUPR menurut Dardak adalah dukungan air baku, dimana saat ini sedang dilakukan pembangunan Waduk Kuwil di Minahasa Utara dan pengendalian banjir di Kota Manado. Namun ada tantangan yang dihadapi dalam pembangunan jalan tol Manado menuju Bitung, yakni terkait proses pembebasan lahan. Ia berharap pihak-pihak terkait dapat saling bersinergi dalam membantu mengatasi tantangan tersebut. "Hal ini demi percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya KEK Bitung," ujar Dardak.

Ia juga menjelaskan bahwa untuk meningkatkan produktivitas logistik perikanan di Bitung, membutuhkan sistem infrastruktur yang kuat. Untuk mewujudkan sistem infrastruktur yang kuat ini dibutuhkan

Darmin Nasution mengatakan bahwa Bitung direncanakan menjadi sentra perniagaan Asia-Pasifik dan akan menjadi simpul kegiatan ekspor di wilayah tersebut, sekaligus menjadi pelabuhan singgah untuk komoditi di wilayah timur Indonesia.

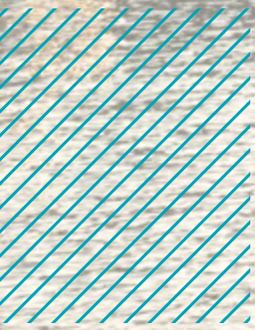
konektivitas antar wilayah. "Konektivitas adalah kata kunci yang harus dilakukan agar komoditi yang berlimpah dapat bermanfaat. Jika didukung dengan konektivitas infrastruktur yang kuat, maka akan hasil dari sektor perikanan dapat menyebar ke wilayah

barat dan tengah Indonesia," tuturnya.

Saat membuka acara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa Bitung direncanakan menjadi sentra perniagaan Asia-Pasifik dan akan menjadi simpul kegiatan ekspor di wilayah tersebut, sekaligus menjadi pelabuhan singgah untuk komoditi di wilayah timur Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menambahkan selain komoditi lokal yang dapat ditingkatkan, Sulawesi Utara memiliki daya tarik sendiri berupa obyek wisata d Bunaken. Daya tarik Bunaken dengan keindahan dasar laut dan alam sekitarnya ini, sudah menjadi tujuan wisata internasional untuk mendukung perkembangan perekonomian Provinsi Sulawesi Utara. Selain dilakukan diskusi, kegiatan di daerah tersebut dilanjutkan dengan survei lapangan. Naufal

Dukungan Kementerian PUPR Terhadap Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pariwisata



Indonesia memiliki banyak obyek wisata yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Sehubungan dengan hal itu pemerintah telah menetapkan 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dari jumlah tersebut, telah ditetapkan 10 KSPN yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. Dua dari 10 KSPN tersebut yakni kawasan Danau Toba di Sumatera Utara dan Tanjung Lesung di Provinsi Banten. Sejumlah program pembangunan infrastruktur telah dan akan dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendukung percepatan pengembangan pariwisata nasional tersebut.



Kawasan sekitar danau Toba

Sumber: Dok BPIW

Pembangunan segala sektor terus dilakukan pemerintah, salah satunya sektor pariwisata. Keindahan alam yang mempesona dan aneka budaya tradisional di beberapa daerah menjadi potensi yang perlu dimaksimalkan agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Pemerintah pun telah memprioritaskan pengembangan pariwisata di 10 KSPN. Kesepuluh KSPN tersebut adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Tanjung Lesung di Banten, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Gunung Bromo di Jawa Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara.

Beberapa program pembangunan infrastruktur sedang dan akan dilakukan Kementerian PUPR guna mendukung 10 KSPN yang diprioritaskan pengembangan oleh pemerintah, seperti pelebaran jalan sekitar Tanjung Kelayang di Provinsi Bangka Belitung, Pengembangan 13 desa wisata di sekitar Borobudur, dan pembangunan jalan tol Bandara Praya hingga Mandalika di NTB.

Selain itu Kementerian PUPR juga mendukung pembangunan infrastruktur Bandara Abdul Rahman Saleh untuk mempermudah

destinasi wisata ke Gunung Bromo di Jawa Timur, Pembangunan Jalan Labuan Bajo –Kondo untuk mendukung kunjungan wisata di Labuan Bajo di NTT, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (PAM) Regional Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan pembangunan Jalan Lingkar di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara untuk mendukung pariwisata di Morotai Maluku Utara.

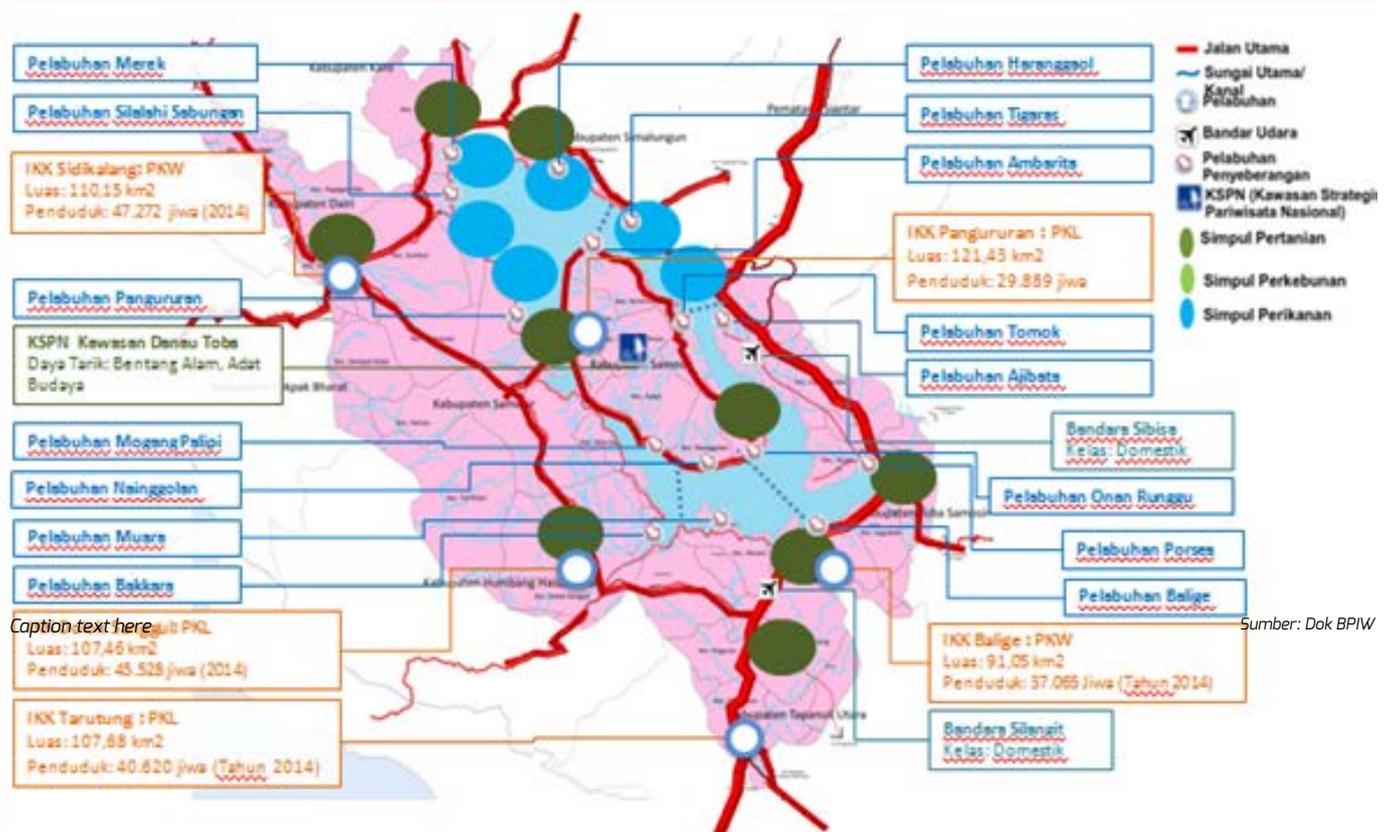
Kementerian PUPR juga memiliki sejumlah program pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan Wisata Danau dan kawasan Tanjung Lesung. Baru-baru ini Kementerian PUPR telah melakukan beberapa langkah pengembangan dua kawasan itu. Seperti dukungan Kementerian PUPR dalam pengembangan dua kawasan wisata itu?. Berikut ulasannya : Kementerian PUPR sangat mendukung pengembangan Danau Toba dan sekitarnya, dengan

membuat sejumlah program pembangunan infrastruktur yang berbasis pengembangan wilayah. Kawasan Danau Toba merupakan terbesar di Indonesia. Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera menunjukkan di kawasan sekitar Danau Toba terdiri dari 8 kabupaten dan 64 kecamatan, dengan total luas kawasan (perairan dan daratan) mencapai 656.261 Ha. Dengan

Pembentukan badan otorita bertujuan agar pengembangan Danau Toba dapat lebih terkoordinasi dengan baik. Dengan pembentukan badan ini diharapkan Danau Toba menjadi “Monaco of Asia”

Membangun Infrastruktur Danau Toba Untuk Menjadi “Monaco of Asia”

Profil Kawasan Danau Toba



memiliki luas sekitar 100 x 30 kilometer dan memiliki kedalaman hingga 529 meter, Danau Toba memiliki keindahan luar biasa.

Tak hanya air danau yang tenang, tetapi juga bentang alam pegunungan yang menghijau. Kondisi alam yang mempesona dan adat istiadat yang terjaga dengan baik, menambah eksotismenya Danau Toba. Meski memiliki keindahan alam yang mempesona namun jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba semakin menurun.

Data Kementerian Koordinator Maritim menunjukkan pada tahun 1991 wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba mencapai 500 ribu wisatawan, namun dikarenakan lemahnya manajemen transportasi udara jumlah wisatawan turun drastis menjadi 200 ribu wisatawan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah permasalahan akses menuju kawasan wisata tersebut. Bila menggunakan kendaraan pribadi dari bandara Kualanamu menuju Danau Toba membutuhkan waktu 4-5 jam.

Untuk mengatasi hal itu Presiden Joko Widodo meminta dilakukan percepatan pembangunan bandara Sibisa dan Silangit. Maskapai penerbangan milik pemerintah, Garuda Indonesia juga sudah ditugaskan untuk menambahkan rute Jakarta-Silangit yang akan beroperasi 3 kali dalam seminggu guna mencapai target 1, 5 juta wisatawan tahun 2024. Selain itu Kementerian PUPR membuat jalan tol yang menghubungkan Medan- Kualanamu-Tebing Tinggi yang masih dalam pengerjaan. Dengan jalan tol tersebut, waktu perjalanan dapat di-perpendek menuju Danau Toba.

Banyaknya program pembangunan yang dibuat, baik dari Kementerian PUPR maupun kementerian lain. Bahkan sempat digelar rapat koordinasi di Institut Teknologi Del, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara, Januari lalu, untuk menindak lanjuti pembentukan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba. Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli ini juga dihadiri sejumlah

Menteri, salah satunya Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Pembentukan badan otorita bertujuan agar pengembangan Danau Toba dapat lebih terkoordinasi dengan baik. Dengan pembentukan badan ini diharapkan Danau Toba menjadi "Monaco of Asia", pariwisata tingkat internasional yang dapat memikat wisatawan mancanegara. Keindahan pemandangan Monaco dan dengan kondisi kawasan yang bersih menjadikan inspirasi untuk menjadikan Danau Toba menjadi Monaco di benua Asia.

Kementerian PUPR juga kini tengah membangun dan menyiapkan rencana pembangunan infrastruktur yang berbasis pengembangan wilayah. Kepala BPIW Kementerian PUPR Hermanto Dardak mengatakan pembangunan infrastruktur di Danau Toba dibagi dua fokus infrastruktur yakni infrastruktur menuju Danau Toba dan infrastruktur di Danau Toba tersebut. Kesepuluh KSPN termasuk Danau Toba disebut sebagai "10 New Bali". Istilah ini dimaksudkan bahwa ke-10 KSPN akan dioptimalkan pengembangannya sehingga dapat seperti Bali yang sudah sangat terkenal di seluruh dunia.

Untuk itu BPIW juga telah memasukkan kawasan Danau Toba dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pusat Pertumbuhan Terpadu Metro Medan-Tebing Tinggi- Dumai- Pekanbaru. Dalam WPS ini terdapat sejumlah rencana pengembangan infrastruktur baik jalan, perumahan, air minum, sungai, di beberapa kota seperti Simalungun, Pematang Siantar, Rantau Prapat, Dumai, hingga ke Pekanbaru. "Kita tahu tantangan itu dan tidaklah mudah untuk mengatasinya. Namun, tantangan tersebut sudah mulai ditangani dengan pembuatan jalan tol Kualanamu – Tebing Tinggi yang direncanakan akan selesai di tahun 2016, dan Tebing Tinggi – Pematang Siatar ditahun 2017," tutur Dardak beberapa waktu yang lalu.

Kemudian juga dilakukan pengembangan prasarana fisik dasar seperti jaringan listrik, komunikasi, air bersih, dan sistem limbah di 19 sub kawasan prioritas. Selanjutnya dilakukan pengembangan fasilitas umum seperti toilet, rest area, pelayanan medis, dan warnet di 19 sub kawasan prioritas. Ada juga pengembangan fasilitas pariwisata seperti pusat informasi wisata, akomodasi, dan rumah makan.

Untuk infrastruktur jalan, rencana yang disiapkan adalah peningkatan kualitas jalan lingkar Samosir, peningkatan jalan Tele-Pangururan, dan pembangunan fasilitas cruise ship (kapal pesiar) internasional di pelabuhan baru Kuala Tanjung. Dengan fasilitas ini diharapkan para wisatawan asing yang menggunakan kapal pesiar bisa mampir menikmati keindahan Danau Toba. Selain itu dilakukan peningkatan fasilitas dan kualitas dermaga penyebarangan ke Pulau Samosir dari Ajibata, Sepinggan, Balige, Muara, dan Haranggaol di beberapa kabupaten sekitar Danau Toba.

Agar dapat cepat terealisasi, pada tahun ini dilakukan percepatan kegiatan pengembangan infrastruktur di kawasan Danau Toba. Untuk

mendukung percepatan tersebut BPIW telah ikut mengupayakan kerjasama dengan World Bank. Hasilnya, World Bank sepakat akan mendukung Kementerian PUPR membangun Danau Toba dan KSPN prioritas lainnya. Untuk mempersiapkan pengembangan kawasan Danau Toba, mulai pertengahan tahun ini langkah pertama yang akan dilakukan adalah penyiapan masterplan. Kedua, membangun Sumber Daya Manusia dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Ketiga, membangun infrastruktur. Keempat, membangun kelembagaan kawasan Danau Toba.

Beberapa satminkal juga telah membangun infrastruktur dan menyusun program untuk pengembangan Danau Toba dan sekitarnya. Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) akan memaksimalkan program yang ada di tahun ini seperti terkait peningkatan Embung Aek Natonang di Kabupaten Samosir, pembersihan enceng gondok secara rutin dan normalisasi saluran Tanah Ponggol.

Ditjen Cipta Karya juga akan mengoptimalkan penataan kawasan wisata Pangururan – Tuktuk – Tomok terutama terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Instalansi Pengolahan Air Minum (IPAL), dan persampahan di tahun 2016-2017. Selain itu yang perlu dilakukan adalah pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang

berbasis Reduce, Reuse dan Recycle (3R) di beberapa Kabupaten sekitar Danau Toba dan mendukung Anjungan Cerdas di kawasan wisata Danau Toba.

Sedangkan terkait penyediaan ditekankan pada rehabilitasi kawasan kumuh dan pembangunan unit-unit perumahan baru di wilayah tersebut. Koordinasi antar instansi yang bersentuhan dengan masalah ini juga dilakukan. Ditjen Bina Marga saat ini juga sedang mengembangkan rencana jalan tol dari Tebing Tinggi – Prapat – Sibolga. Pembangunan jalan tol ini untuk mempermudah wisatawan menuju Danau Toba. Sesuai dengan usulan APBN-P, pada tahun 2016 ini akan dilakukan pelebaran jalan di Jalan Lingkar Prapat sebagai bagian dari ruas Tebing Tinggi menuju Prapat. Selain berpotensi dalam bidang pariwisata, Danau Toba juga dapat dikembangkan menjadi lumbung pangan dan areal perkebunan.

Kemudian Jalan lingkar Danau Toba yang masuk dalam jalan nasional adalah mulai dari Merek Kabupaten Simalungun hingga Panji di kabupaten Tapanuli Utara dengan jarak total 363,769 km. Sedangkan jarak jalan lingkar Pulau Samosir dari Tomok- Onan Runggu mencapai 145,9 km. Diharapkan pembangunan jalan lingkar tersebut bisa selesai tahun 2016 ini. Dengan segala langkah yang sudah dan akan dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata ke Danau Toba.

BPIW juga telah memasukkan kawasan Danau Toba dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pusat Pertumbuhan Terpadu Metro Medan-Tebing Tinggi- Dumai- Pekanbaru. Dalam WPS ini terdapat sejumlah rencana pengembangan infrastruktur baik jalan, perumahan, air minum, sungai, di beberapa kota seperti Simalungun, Pematang Siantar, Rantau Prapat, Dumai, hingga ke Pekanbaru.

Pengembangan Kawasan Tanjung Lesung Untuk Tingkatkan Kunjungan Wisata



Pantai Tanjung Lesung

Sumber: Dok BPIW

Kawasan Tanjung Lesung diprioritaskan akan dikembangkan pemerintah. Sehubungan dengan itu Kementerian PUPR telah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung pengembangan kawasan Tanjung Lesung, agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata di kawasan tersebut.

Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten menunjukkan selama tahun 2015 jumlah wisatawan mancanegara yang datang mencapai 180 ribu wisatawan dan wisatawan domestik mencapai 2 juta wisatawan. Jumlah tersebut untuk kunjungan ke kawasan wisata Tanjung Lesung dan Kawasan Wisata Pantai Bayah. Upaya pengembangan kawasan wisata terutama di Tanjung Lesung, diharapkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat sebesar 5% dan untuk wisatawan domestik 10% per tahun.

Dengan memiliki keindahan pantai yang mempesona, kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini dikunjungi wisatawan mancanegara terutama dari Belanda, Perancis dan beberapa negara di Asia Tenggara. Daya tarik lain bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi Banten yakni adanya beberapa kegiatan wisata yang dilakukan tiap tahun, seperti Festival Cisadane, Festival Bahari, Festival Kuliner Tangsel, Panjang Maulud, Ethnic Festival, Seba Baduy dan Festival Debus.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Rezeki Peranginagan menuturkan pengembangan wisata tersebut perlu didukung dengan pengembangan infrastruktur. Saat ini, terdapat jalan nasional dari Cibaliung menuju Sukabumi yang melintasi wilayah selatan Provinsi Banten. Kementerian PUPR akan membantu dengan membangun jalan tol dari Serang menuju Panimbang sepanjang 83,7 km.

“Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang masih dalam tahap pembebasan lahan, begitu pula dengan pembangunan Bandara Panimbang. Untuk masalah lahan akan menggunakan anggaran dari pemerintah, sedangkan untuk pembangunannya melalui investasi pihak swasta,” ungkap Rezeki. Kementerian PUPR juga akan membangun jalan tol Serang-Tanjung Lesung guna mendukung kawasan tersebut. Jalan tol sepanjang sekitar 67 km itu diharapkan selesai dalam kurun waktu tiga tahun.

Pengembangan pariwisata di wilayah selatan Banten seperti Tanjung Lesung, akan memberi multiplier effect terhadap perekonomian di

daerah tersebut. Selain Tanjung Lesung, pembangunan pariwisata juga akan berdampak positif pada pembangunan yang berkelanjutan kawasan wisata lainnya yang ada di daerah itu seperti Taman Nasional Ujung Kulon, Pantai Bayah, dan Kampung Suku Baduy. Tidak hanya

itu pengembangan kawasan ini juga untuk mengatasi disparitas pendapatan daerah yang cukup tinggi di wilayah selatan dengan utara Provinsi Banten. Selama ini pendapatan Provinsi Banten didominasi dari wilayah bagian utara sebesar 80 %, sedangkan pendapatan dari wilayah bagian selatan hanya sebesar 20 %.

Pengembangan kawasan Tanjung Lesung, juga harus didukung dengan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di sektor pariwisata tersebut.

Untuk itu Provinsi Banten telah membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perhotelan dan Pariwisata. Hal ini penting mengingat di provinsi ini masih memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi yaitu sebesar 468 ribu jiwa atau kurang lebih 8-9% dari total penduduk. Rata-rata pengangguran di kota ini berusia 15 hingga 49 tahun.

Agar dapat dikunjungi banyak wisatawan, perlu juga ditunjang dengan promosi ke luar negeri. Untuk promosi ini Pemerintah Provinsi Banten

telah mengikuti pameran yang diadakan di Inggris dan Malaysia pada tahun 2010 lalu.

World Bank ternyata juga tertarik untuk membantu pengembangan kawasan pariwisata di Indonesia terutama 10 KSPN, termasuk Tanjung Lesung. Untuk merealisasikan bantuan yang akan diberikan, World Bank didampingi BPIW melakukan survei ke Tanjung Lesung, 22-23 Februari lalu. Selain survei lapangan, juga dilakukan rapat koordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat. Dukungan Kementerian PUPR lainnya, terkait dukungan penyediaan air bersih, dimana saat ini

sedang dibangun Waduk Karian untuk suplai air baku ke wilayah selatan Banten. **Naufal/Nina/Hendra**

Kawasan Tanjung Lesung diprioritaskan untuk dikembangkan pemerintah. Sehubungan dengan itu Kementerian PUPR telah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung pengembangan kawasan Tanjung Lesung, agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata di kawasan tersebut.



Membangun Kota Baru Publik di Indonesia



Oleh : Endra S. Atmawidjaja, S.T., M.Sc., D.E.A.

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan kota Baru BPIW
Kementerian PUPR

Saat ini tingkat urbanisasi sangat tinggi, dimana 53% dari penduduk Indonesia tinggal di kota. Untuk merespon tantangan urbanisasi yang sangat pesat itu, dibutuhkan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru terutama di luar Pulau Jawa. Dengan kondisi itulah Kementerian PUPR melalui BPIW merancang kota baru untuk publik.



Perencanaan pemukiman kota baru

Sumber: Kementerian PUPR

Saat ini tingkat urbanisasi sangat tinggi, dimana sekitar 53% penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Untuk merespon tantangan urbanisasi yang sangat pesat itu, dibutuhkan strategi yang salah satunya adalah pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru terutama di luar Pulau Jawa. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut serta sesuai amanat RPJMN 2015-2019, Kementerian PUPR melalui BPIW me-

rencanakan pengembangan Kota Baru untuk publik. Kota baru untuk publik dimaksudkan agar seluruh lapisan masyarakat termasuk kelas menengah ke bawah bisa tinggal di kota baru publik tersebut. Hal ini berbeda dengan kota-kota baru yang pernah dikembangkan oleh swasta sehingga cenderung diperuntukkan untuk kalangan atas saja. Terdapat 2 jenis kota baru yang disiapkan pemerintah, yaitu kota baru yang dikembangkan di dae-



rah yang relatif kosong, dan kota baru satelit yang mengindik pada kota intinya.

Pertama, kota baru adalah suatu wilayah yang relatif belum berkembang direncanakan sejak awal menjadi kawasan perkotaan dengan berbagai tujuan tertentu. Sebagai contoh Walini di Provinsi Jawa Barat sengaja disiapkan untuk dikembangkan menjadi kota dari kondisi semula perkebunan dan tanpa fasilitas perkotaan. Tujuan dari rencana pengembangan kota baru salah satunya adalah dalam rangka pengembangan ekonomi di suatu wilayah, misalnya pengembangan kota baru Sei Mangke di Provinsi Sumatera Utara yang berorientasi mendukung sektor industri skala besar. Ada juga rencana pengembangan kota baru untuk memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mendapatkan hunian

yang layak, misalnya rencana pengembangan kota baru Maja di Provinsi Banten. Selain itu, pengembangan kota baru dapat berfungsi sebagai kota pusat pemerintahan misalnya pengembangan kota baru Sofifi di Provinsi Maluku Utara dan kota baru Tanjung Selor di Provinsi Kalimantan Utara.

Pengertian lain dari kota baru adalah kawasan perkotaan baru sebagai kota satelit yang mengindik pada kota intinya. Kota Baru seperti ini

contohnya adalah Makassar di Sulawesi Selatan, dan Manado di Sulawesi Utara. Kedua

Konsep BPIW terkait kota baru ini adalah pusat pertumbuhan yang diutamakan di luar Jawa. Kotanya bersifat tematik, jadi harus dengan fungsi tertentu yang mendukung basis ekonominya kota tersebut, jadi harus punya basis kalau tidak kota barunya mati.

kota ini termasuk kawasan perkotaan yang dibuat khusus, dimana telah ada kota intinya kemudian dibangun kota satelit untuk publik. Kasus ini menyerupai BSD, Lippo, Sentul, dan 25 kota baru lainnya di Jabotabek namun bedanya sekarang dilakukan intervensi perencanaan oleh pemerintah untuk kepentingan publik.



Wilayah kota baru kemayoran

Sumber: BPIW

Kedua, defnisi kota baru yang dimaksud tersebut berbeda pengertiannya dengan 'baru menjadi kota' atau 'kota yang baru' yang sebelumnya belum memiliki status sebagai 'kota' sebagai daerah otonom. Selama ini pemahaman mengenai 'kota yang baru' adalah wilayah yang berkembang secara alami (*growing by nature*) hingga menjadi kota secara otonom, misalnya Kota Cimahi yang sebelumnya merupakan salah satu ke-

hulunya kawasan yang belum berkembang termasuk wilayah Kabupaten Bogor terus berkembang menjadi kota dan disahkan tahun 1999 sebagai kota otonom. Sebelumnya kita memiliki 45 kota otonom sebelum era otonomi daerah dan sekarang menjadi 93 kota otonom. Kota otonom baru ini semula kawasan yang belum berkembang dan akhirnya berkembang semakin besar sehingga memerlukan penanganan skala kota oleh

kota baru harus bersifat tematik serta harus memiliki fungsi tertentu yang menjadi basis ekonomi kota tersebut. Basis ekonomi harus dilihat dari potensi yang ada di daerah tersebut, dapat berupa industri, pariwisata, pusat pemerintahan, atau pendidikan. Suatu kota baru dapat memiliki dua basis ekonomi, seperti Walini yang selain kota pemerintahan juga merupakan kota pendidikan. Di samping itu, pengembangan kota baru diharapkan juga menjadi *self content city* yang berarti kota tersebut tidak hanya menjadi dormitory town saja, melainkan juga menjadi kota yang hidup sepanjang hari.

Sejumlah contoh kota baru yang gagal di beberapa negara, seperti Kota Masdar di Uni Emirat Arab dan Dongtan di dekat Shanghai, China. Kota-kota baru tersebut telah dirancang dengan menyewa arsitek ternama dan memiliki sejumlah konsep seperti *smart city*, *green city*, dan *sustainable city*. Namun, ternyata konsep-konsep tersebut belum dapat menarik orang untuk tinggal disana. Oleh karena itu, jelas bahwa adanya basis

Untuk membuat sebuah kota tantangannya adalah bagaimana didukung oleh perencanaan yang baik. Perencanaan ini juga harus ada dukungan dari stakeholder, dukungan politik dari DPR dan juga DPRD, serta juga dukungan dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat ini sangat penting.

camatan di Kabupaten Bandung sebagai kota administratif dan pada tahun 2001 ditetapkan sebagai kota, serta Kota Depok yang da-

Walikota.

BPIW memiliki konsep terkait pengembangan kota baru di Indonesia, yakni rancangan

ekonomi penting agar kota baru tetap hidup dan berkembang.

Selain itu, perencanaan kota baru yang dilakukan oleh BPIW juga terkait dari adanya kecenderungan dalam kota-kota baru swasta, di mana mayoritas penghuninya hanya berasal dari kalangan tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, yang kami lakukan adalah menjaga keseimbangan dalam suatu kota, antara kalangan kelas atas, menengah, dan bawah. Caranya adalah dengan menjaga harga tanah agar tidak terlalu mahal, dan menyediakan fasilitas publik yang dapat diakses oleh seluruh kalangan baik kalangan menengah hingga MBR, sehingga kota menjadi lebih dinamis dan inklusif.

Namun, tentunya pembangunan kota baru memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Pembangunan sebuah kota baru harus diawali dengan perencanaan yang baik. Perencanaan tersebut perlu didukung oleh para stakeholders, yakni dukungan politik dari DPR dan DPRD serta dukungan dari masyarakat. Tantangan lainnya dalam membangun kota baru adalah diperlukannya waktu yang panjang, dana besar, kesabaran dan ketekunan.

Dalam membangun kota baru diperlukan komitmen jangka panjang. Namun, seringkali hal itu terkendala oleh periode politik yang berakhir setiap lima tahun. Perpindahan mandat politik menyebabkan rentan terjadinya perubahan atau bahkan peniadaan kebijakan terkait pembangunan kota baru yang tengah berlangsung. Sebagai contoh, bisa saja dalam 5 tahun pembangunan kota baru masih dalam tahap pembebasan lahan. Oleh pemangku mandat selanjutnya, pembangunan kota baru tersebut dapat dianggap tidak efektif dan dihentikan. Padahal, pembangunan kota baru memang membutuhkan waktu puluhan tahun.

Di Indonesia, pembangunan kota baru perlu didukung dengan pembuatan Undang-Undang Perkotaan yang selama ini belum ada. Suatu undang-undang tidak dibatasi oleh mandat politik, sehingga dapat men-



Perencanaan perkantoran kota baru kemayoran

Sumber: BPIW

Untuk Indonesia, membuat kota baru ini juga harus didukung dengan dibuatnya undang-undang perkotaan. Selama ini undang-undang tersebut tidak ada. Dengan adanya undang-undang tersebut maka program Kota Baru tetap jalan meski terjadi perubahan kepemimpinan nasional.

jadi payung hukum jangka panjang untuk pembangunan kota baru yang memerlukan waktu hingga lebih dari 25 tahun. undang-undang ini akan diatur semua hal terkait kota baru, seperti konsep, tata cara, dan dukungan kelembagaan.

Di Indonesia, pembangunan kota baru perlu didukung dengan pembuatan Undang-Undang Perkotaan yang selama ini belum ada. Undang-undang ini dibutuhkan mengingat fakta tadi, bahwa 53% penduduk Indonesia kini tinggal di kota, serta berbagai potensi kota sebagai akumulasi potensi yang ada baik ekonomi, sosial dan lingkungan, tempat manusia berkreasi, berproduksi, dan berevolusi, serta menciptakan peradaban. Suatu undang-undang tidak dibatasi oleh mandat politik, sehingga dapat menjadi payung hukum jangka panjang untuk pembangunan kota baru yang memerlukan waktu hingga lebih dari 25 tahun. undang-undang

ini akan diatur semua hal terkait kota baru, seperti konsep, tata cara, dan dukungan kelembagaan.

Hal terakhir yang tak kalah penting adalah peran wali kota dalam suatu kota. Agar suatu kota dapat tumbuh dengan baik, dibutuhkan wali kota yang memiliki visi, kapasitas, serta dukungan politik dan passion untuk mengelola kota. Semua aspek tersebut itu harus lengkap dimiliki seorang wali kota sebagai urban manager, yang dapat mengelola suatu kota dengan baik.

Bantimurung, The Kingdom of Butterfly

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Hadirkan Suasana Alam yang Eksotis



Pantai Seger Mandalika

Sumber: lombokindonesia.tumblr.com

Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan memiliki sebuah taman nasional yakni Taman Nasional Bantimurung Bulusaung. Taman nasional ini memiliki luas 43.750 hektar, dan wilayahnya berbatasan dengan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan seperti Kabupaten Bone di sisi timur, dan Kabupaten Pangkep di sisi barat. Kawasan Bantimurung yang eksotis sangat dikenal hingga ke mancanegara dengan sebutan sebagai "The Kingdom of Butterfly". Julukan itu diberikan oleh seorang ahli antropologi dan biologi Inggris, Alfred Russel Wallace pada tahun 1857, karena keanekaragaman kupu-kupu yang ada di kawasan tersebut. Hal ini pula yang mendasari pengelola taman nasional ini mengembangkan penangkaran kupu-kupu, dengan konsep Taman Kupu-kupu. Selain untuk kepentingan konservasi jenis, Taman Kupu-kupu ini berfungsi sebagai wahana pendidikan konservasi bagi masyarakat umum.

Dalam program Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kawasan tersebut merupakan bagian

akan memajukan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Selain itu akan berdampak pada Taman Nasional Bantimurung, karena akan meningkatkan jumlah pengunjung.

Kawasan Bantimurung yang eksotis sangat dikenal hingga ke mancanegara dengan sebutan sebagai "The Kingdom of Butterfly". Julukan itu diberikan oleh seorang ahli antropologi dan biologi Inggris, Alfred Russel Wallace pada tahun 1857, karena keanekaragaman kupu-kupu yang ada di kawasan tersebut.

Untuk menuju taman nasional ini dapat dengan menggunakan kendaraan. Jarak antara Kota Makassar menuju Bantimurung mencapai sekitar 42 km. Sedangkan dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam, dengan jarak sekitar 24 km. Selain dengan kendaraan pribadi,

dari WPS 28 yakni Makassar – Parepare – Mamuju. Sementara untuk Kabupaten Maros, Pemerintah merencanakan sebuah Kawasan Industri. Dengan dikembangkannya Maros menjadi Kawasan Industri, maka

perjalanan ke taman nasional juga bisa menggunakan kendaraan umum atau pete-pete (istilah untuk angkutan kota Makassar), dengan harga terjangkau.

Perjalanan menuju kawasan Bantimurung menghadirkan pemandangan pedesaan dan bukit kapur serta keindahan lekuk gugusan karst yang merupakan bentang alam unik yang terbentuk oleh erosi bawah tanah batuan seperti batu kapur dan marmer yang larut dalam air. Gugusan karst ini tersusun dengan indah.

Saat memasuki kawasan wisata ini maka kita akan disambut dengan patung kupu-kupu raksasa di depan pintu gerbang, serta patung kera raksasa yang dipajang setelah memasuki gerbang utamanya. Taman Nasional Bantimurung juga menyuguhkan pemandangan alam pegunungan yang indah dengan kesejukan udara disekitarnya. Sebagai objek wisata andalan, Bantimurung menyodorkan beragam keindahan alam, seperti air terjun yang mengalir menuju sungai, gua dengan keindahan ornamennya, kupu-kupu yang beterbangan serta museum



Tugu Bantimurung

kupu-kupu yang akan menambah wawasan para pengunjung.

Untuk menikmati seluruh tempat yang ada di kawasan wisata ini, cukup membayar tiket seharga Rp 25.000 per orang. Seluruh area wisata di taman ini harus ditempuh dengan berjalan kaki. Meski berjalan kaki, tidak perlu khawatir, karena jarak menuju area wisata tersebut relatif cukup dekat.

Sesaat setelah memasuki area wisata, para pengunjung langsung disambut dengan pemandangan air terjun yang mengalir deras menuju aliran sungai, yang diapit oleh kokohnya tebing-tebing terjal. Jika aliran air terjun tidak terlalu deras, maka pengunjung dapat bermain air dan berfoto. Tidak hanya memiliki air terjun yang spektakular, taman nasional ini juga memiliki goa yang terletak di hulu air terjun. Dengan menaiki puluhan anak tangga yang terletak di sisi kiri air terjun kemudian berjalan menyusuri hulu air terjun, maka akan dijumpai dua buah goa yang dengan nama Goa Batu dan Goa Mimpi.

Masing-masing goa masih memiliki stalaktit yang mempunyai banyak bentuk yang unik dan indah. Stalaktit adalah sejenis mineral sekunder (speleothem) yang menggantung di langit-langit gua kapur. Keunikan alam ini akan membuat decak kagum bagi yang melihatnya. Pengunjung bisa menelusuri Goa Mimpi dan Goa Batu dengan menyewa senter dan memakai jasa pemandu wisata yang akan mengantar para pengunjung masuk ke dalam goa yang gelap dan cukup dalam tersebut.

Hal unik lainnya yang bisa kita jumpai di Taman Nasional Bantimurung ini



Air Terjun Bantimurung

Sumber: BPIW

adalah keanekaragaman kupu-kupu yang bertebaran disekitar area ini. Atraksi kupu-kupu beterbangan beraneka warna menambah semaraknya suasana. Keindahan panorama ini pun dapat dinikmati dari atas ketika kita melayang menggunakan flying fox. Pengunjung pun dapat menyusuri

Dengan dikembangkannya Maros menjadi Kawasan Industri, maka akan memajukan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Selain itu akan berdampak pada Taman Nasional Bantimurung, karena akan meningkatkan jumlah pengunjung.

keindahan aliran sungai hingga ke hulunya, di danau Kassi Kebo. Danau ini dikelilingi oleh tebing terjal dan dihiasi hamparan pasir putih di tepiannya. Danau ini menjadi habitat utama kupu-kupu Bantimurung.

Pemerintah daerah Kabupaten Maros dan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung terus mengembangkan berbagai sarana dan prasarana wisata. Di sekitar air terjun terdapat beberapa Gazebo sebagai tempat wisatawan beristirahat. Tak hanya itu beberapa fasilitas disediakan seperti mushola, toko souvenir, kolam renang anak, toilet, area parkir, dan penginapan telah tersedia untuk mendukung kenyamanan berwisata. Andina

Dukungan WPS terhadap 10 KSPN

Dukungan yang diberikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengakomodasi infrastruktur di sekitar 10 Prioritas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional ini terangkum di dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019. Diharapkan dengan dukungan dari Kementerian PUPR akan membantu percepatan pengembangan pariwisata sesuai dengan permintaan Presiden Republik Indonesia.

1. Danau Toba; Sumatera Utara

- Jaringan jalan lingkaran dalam, dan luar kawasan Danau Toba mantap dan handal
- Meningkatnya dan meratanya kualitas infrastruktur jalan di seluruh kabupaten di kawasan Danau Toba
- Bandara Sibisa dan Silangit
- Pengamanan pantai Situngkir
- Penataan kawasan wisata (SPAM, IPAL, Persampahan)

2. Tanjung Kelayang; Bangka Belitung

- Bandar Udara H.A.S Hanandjoeddin
- Pelebaran jalan sekitar Tanjung Kelayang
- Pembangunan bendung dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku di KSPN

3. Kepulauan Seribu

- Pelabuhan Tanjung Priok

4. Tanjung Lesung, Banten

- Bandara Citarate
- Prasarana Air Baku
- Jalan Tol Serang – Panimbang
- Penataan KSPN dan KEK Tanjung Lesung (TPA Regional, Jalan akses wisata, SPAM Regional, IPAL Regional)
- Infrastruktur pengendali banjir

5. Borobudur, Jawa Tengah

- Bandar Udara Kulon Progo
- Pengembangan 13 desa wisata di sekitar Borobudur
- Pelebaran jalan sekitar Borobudur
- Peningkatan Supply air bersih dan pengamanan sungai
- Konservasi taman wisata alam Kawasan Borobudur

6. Bromo, Jawa Timur

- Bandara Abdul Rahman Saleh

7. Mandalika, Lombok, NTB

- Jalan Tol Bandara Praya – Mandalika
- Jalan Nasional Labuan Bajo – Baleng – Terang
- Bandar Udara Internasional Lombok Praya
- Infrastruktur Cipta Karya Terpadu di Kawasan Pariwisata dan KEK Mandalika
- Pembangunan SPAM

8. Labuan Bajo, NTT

- Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo
- Bandara Komodo
- Pembangunan Jalan Labuan Bajo – Kondo
- Pembangunan SPAM Kota Labuan Bajo

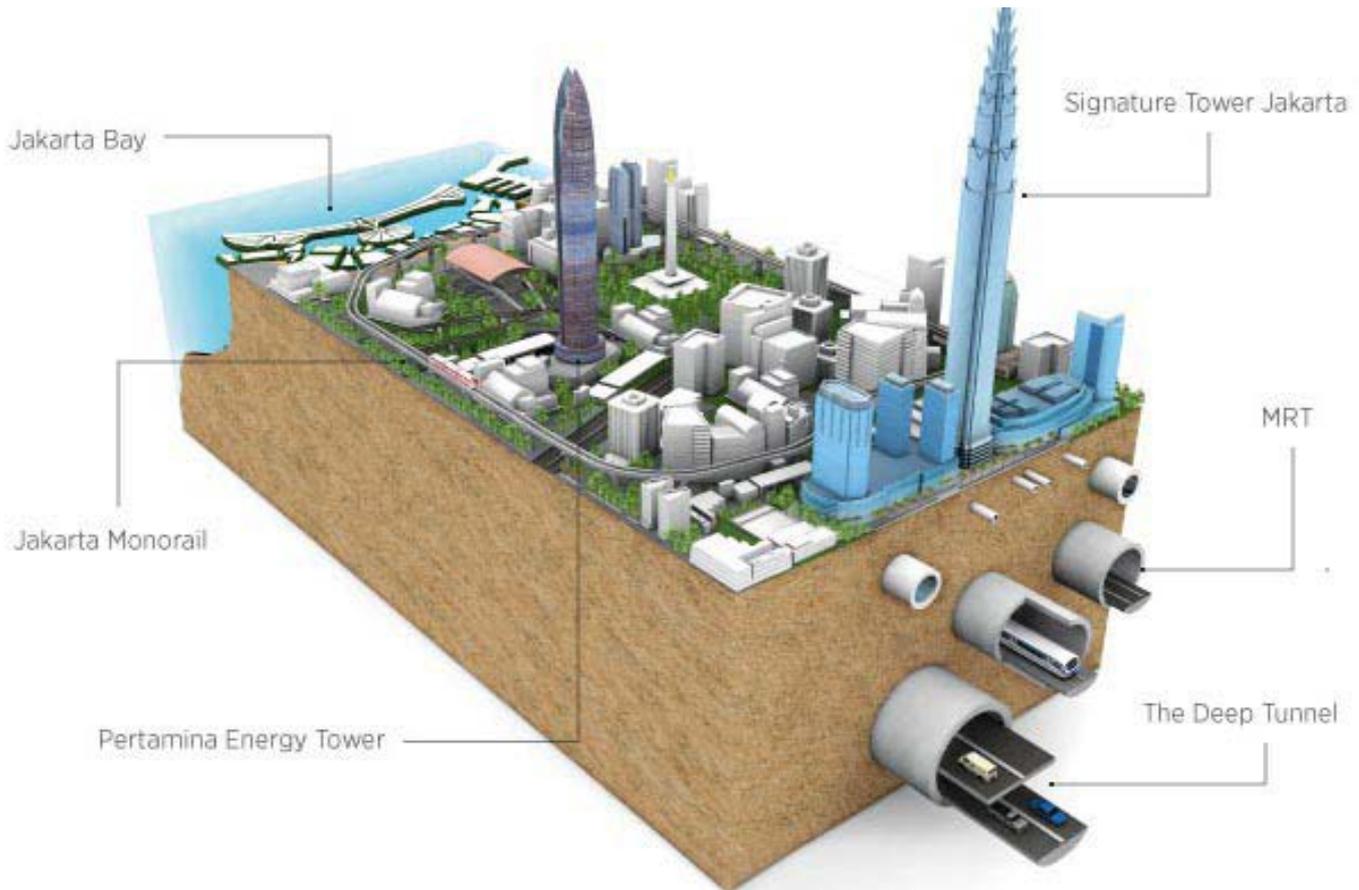
9. Wakatobi, Sulawesi Tenggara

- Bandara Haluoleo
- Pelabuhan Pengumpul Kendari
- Pembangunan SPAM Reg. Wakatobi

10. Morotai, Maluku Utara:

- KEK Morotai, industri pengolahan perikanan
- Jalan Wayabula Sofi
- Jalan Lingkaran di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara
- Infrastruktur SDA pada kawasan pesisir pantai
- Infrastruktur CK terpadu di kawasan perkotaan.

Jakarta *Integrated Tunnel*, Solusi Mengatasi Banjir di Ibukota



Sumber: <http://jakartaintegratedtunnel.id/about-jit>

Setiap kali musim hujan, beberapa ruas jalan di ibukota Indonesia, Jakarta, selalu banjir. Untuk memecahkan persoalan ini teknologi yang telah dikembangkan yakni Jakarta *Integrated Tunnel* (JIT) atau Terowongan Terpadu Jakarta (TTJ). Sistem JIT merupakan saluran air tertutup di bawah tanah yang dibuat dengan tujuan utama, mengendalikan banjir di kota Jakarta. Pembangunan dan pengoperasian JIT dipadukan dengan jalan tol di dalam satu terowongan yang digunakan untuk kedua fungsi tersebut, secara bersama-sama.

Dengan cara ini pembangunan dan pengoperasian (termasuk pemeliharaan) yang seharusnya menjadi tanggungjawab dan kewajiban pemerintah dalam hal pembiayaannya melalui APBN atau APBD, dapat dikurangi secara signifikan yaitu dengan mengalihkan beban tersebut kepada pihak swasta yang mengelola jalan tol. Jadi pada dasarnya JIT adalah proyek pengendalian banjir yang 'dicangkokkan' kepada proyek jalan tol agar prinsip-prinsip Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) bisa diterapkan.

Selain itu beban pengoperasian dan pemeliharaan untuk terowongan terpadu ini pasti akan lebih berat, jika dibandingkan dengan pengoperasian dan pemeliharaan suatu jalan tol yang ada di atas permukaan tanah. Pada JIT, untuk menanggulangi beban pengoperasian

dan pemeliharaan terowongan yang lebih berat tersebut, pihak swasta yang akan menjadi pengelola JIT tersebut harus berusaha untuk mengembangkan berbagai usaha lain, seperti mengolah air sungai menjadi air minum dan memanfaatkan aliran air sungai untuk membangun pembangkit tenaga listrik mikro hidro. Pembangkit tenaga listrik ini digunakan untuk keperluan sistem penerangan, ventilasi dan peralatan tol lainnya di dalam terowongan.

Cara kerja sistem terowongan pengendali banjir ini adalah menggunakan prinsip "bejana berhubungan" yang dapat mengalirkan air tanpa bantuan pompa dan hanya berdasarkan hukum gravitasi. Dengan prinsip ini, air yang biasanya mengalir dari arah hulu ke hilir atau laut, dimungkinkan untuk melakukan hal yang sebaliknya yaitu mengalir dari arah hilir ke hulu, asalkan "bejana" tadi dalam kondisi yang kosong.

Pola pengendalian banjir seperti itu pada dasarnya mengikuti dan melanjutkan konsep pengendalian banjir warisan Belanda, saat Jakarta masih bernama Batavia. Saat itu konsep pengendalian banjir merupakan hasil pemikiran dari Prof. Herman Van Bren tahun 1918. Pada konsep ini, kota Batavia dibentengi oleh saluran atau kanal banjir berbentuk setengah lingkaran di bagian sisi terluar dari kota Jakarta,

dengan maksud untuk menampung dan membentengi kota ini dari semua aliran air yang datang dari arah hulu, agar tidak memasuki kota dan langsung membuangnya ke laut.

Selanjutnya, air hujan yang turun langsung di dalam kota dan volumenya sudah menjadi kecil dan terbatas, dikendalikan dengan beberapa saluran drainase seperti Kali Gresik, Kali Sentiong, dan Kali Sunter. Ketika Belanda meninggalkan Indonesia mereka baru membangun separuh dari konsep Kanal Banjir Barat (KBB). Selanjutnya di era Gubernur Sutiyoso, Pemprov DKI Jakarta melanjutkan menyelesaikan konsep dimaksud dengan membangun Kanal Banjir Timur (KBT).

Namun di dalam perkembangannya kota Batavia ini, wilayahnya telah semakin meluas ke arah Barat, Timur dan terutama ke arah Selatan. Kanal Banjir yang semula direncanakan berada disisi terluar dari kota, pada kenyataannya sekarang ini, telah berada di tengah-tengah kota Jakarta. Perlu adanya penyesuaian dan modifikasi terhadap konsep pengendalian banjir aslinya agar sistem tetap bisa bekerja dan berfungsi dengan baik dan sempurna. JIT adalah hasil dari penyesuaian dan modifikasi untuk menyempurnakan kembali konsep dasar pengendalian banjir kota Jakarta.

Kelebihan yang dimiliki JIT

ologi yang dikembangkan melalui JIT ini memiliki beberapa kelebihan, yakni :

1. JIT dapat mengatasi masalah banjir Jakarta yang diakibatkan oleh luapan Sungai Ciliwung dan Sungai Pesanggrahan, dengan cara menyalurkan air di sebelah hulu sungai tersebut secara "by pass" melalui terowongan di bawah tanah ke arah hilir

Sistem JIT merupakan saluran air tertutup di bawah tanah yang dibuat dengan tujuan utama, mengendalikan banjir di kota Jakarta. Pembangunan dan pengoperasian JIT dipadukan dengan jalan tol di dalam satu terowongan yang digunakan untuk kedua fungsi tersebut, secara bersama-sama.

masuk ke dalam KBB dan langsung menuju ke laut.

2. Teknologi ini juga dapat mengatasi masalah banjir Jakarta yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut dengan cara mengalirkan air laut yang naik tersebut, dari arah hilir ke arah hulu untuk di simpan sementara di dalam kolam-kolam penampungan, yang berada di kedua ujung

terowongan tersebut.

3. JIT mampu mengatasi masalah banjir Jakarta yang diakibatkan oleh adanya genangan air lokal yang besar seperti di Daan Mogot, Cengkareng, Sunter dan Kelapa Gading dengan cara, memfungsikannya sebagai saluran drainase raksasa yang mengalirkan air tersebut masuk ke dalam KBB dan KBT.

4 Fungsi ganda juga dimiliki JIT, yaitu untuk menanggulangi banjir dan mengurangi kepadatan atau kemacetan lalu lintas di wilayah dan pada koridor tertentu.

Dengan adanya dua kolam penampung air di kedua ujung terowongan berupa holding pond/basin dan storage pond/reservoir dapat difungsikan untuk cadangan penyimpanan air banjir. Selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam tanah kembali, untuk menjaga ketinggian permukaan air tanah Jakarta (konservasi air tanah). Dampak negatif penggunaan JIT kepada masyarakat dan lingkungan, relatif

kecil. Polusi udara dan polusi suara mudah untuk dikendalikan karena berada dalam ruang yang tertutup dan terbatas. Naufal
Sumber: <http://jakartaintegratedtunnel.id/about-jit>



Pra Konreg 2016

Medan

Pra Konreg ke-1 dilaksanakan di Kota Medan pada 4-5 Februari 2016 dan diikuti oleh 11 Provinsi yaitu: Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Lampung. Kegiatan ini dihadiri sekitar 500 peserta.



Yogyakarta

Pra Konreg ke-2 dilaksanakan di kota Yogyakarta pada 11-12 Februari. Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 500 peserta, dan merupakan perwakilan dari 6 provinsi yaitu: Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur.



Bali

Pra Konreg ke-3 dilaksanakan di Kota Denpasar, Bali. Acara tersebut dilaksanakan pada 18-19 Februari 2016. Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta yang mewakili 6 provinsi yaitu: Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Barat.

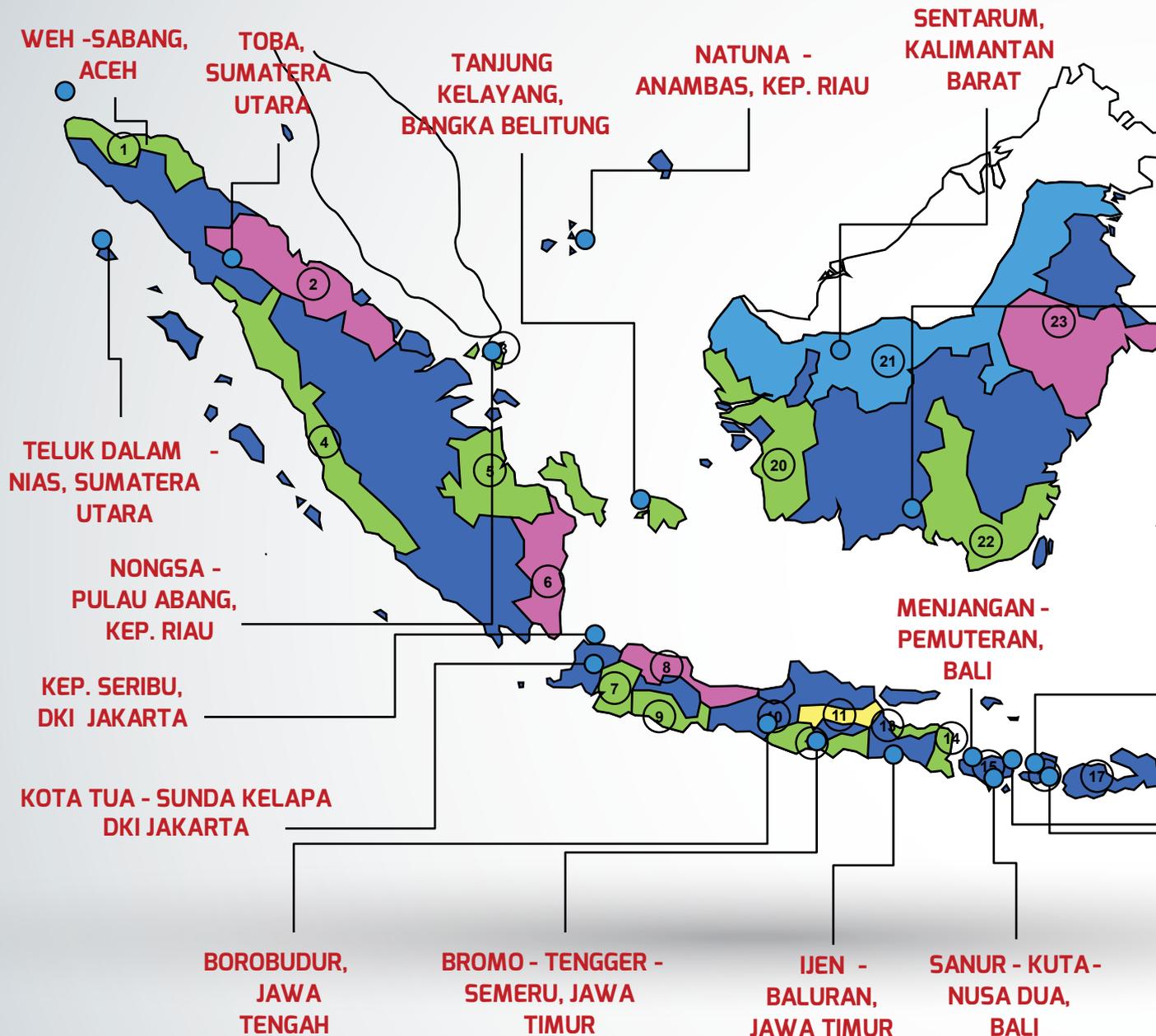


Makasar

Pra Konreg ke-4 di Makassar menjadi kota terakhir dilaksanakannya Pra-Konreg. Pra-Konreg tersebut diadakan pada tanggal 25-26 Februari 2016. Kegiatan tersebut diikuti 11 Provinsi, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara.



KETERPADUAN DENGAN 25 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

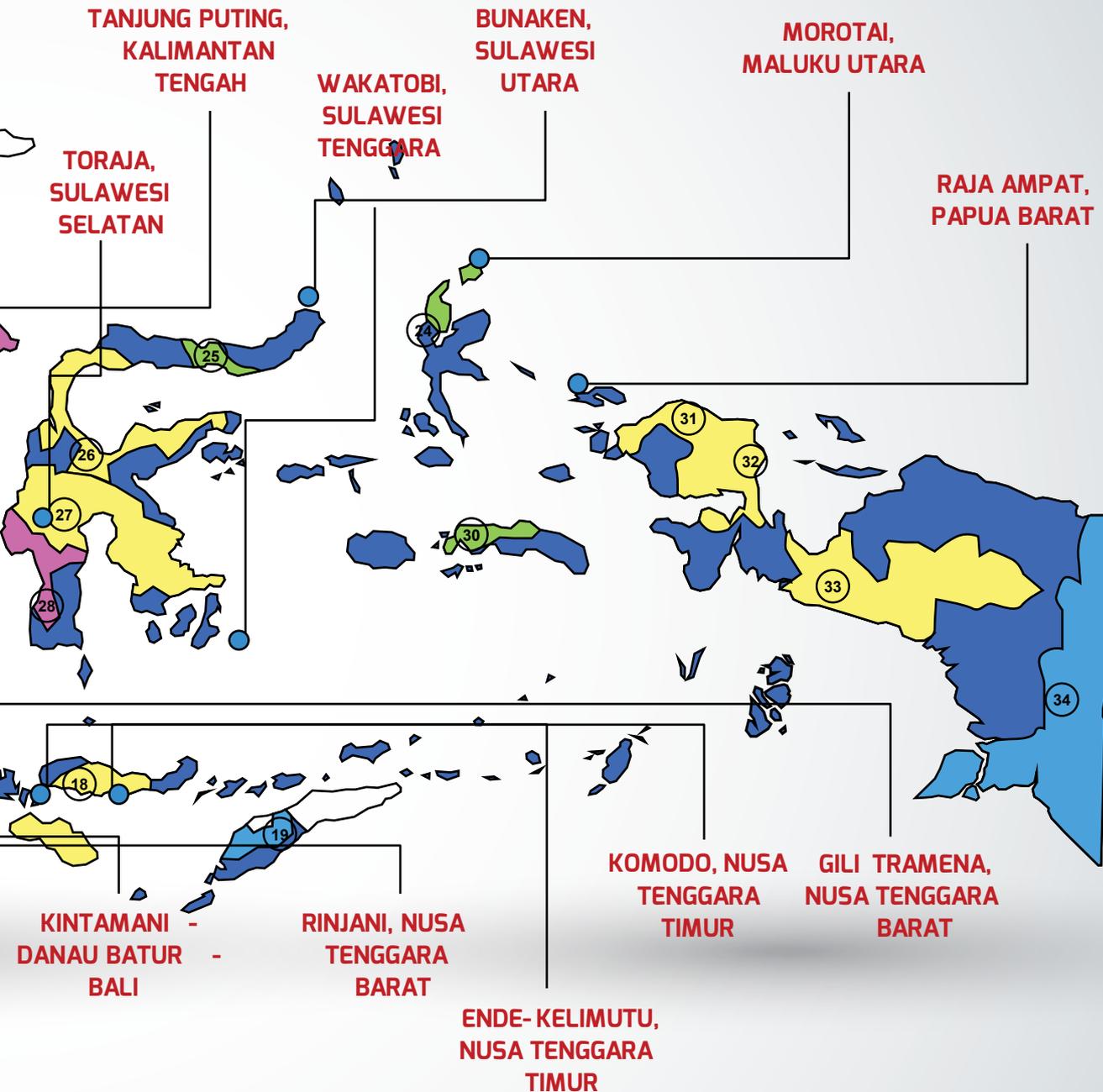


Dari 25 KSPN dipilih 10 Kawasan yang menjadi prioritas tahun 2015 - 2019, yaitu:

Pulau	Kawasan
Sumatera	Danau Toba
	Belitung
Sulawesi	.Wakatobi

Pulau	Kawasan
Jawa	Kepulauan Seribu
	Tanjung Lesung
	Bromo - Tengger - Semeru
	Borobudur

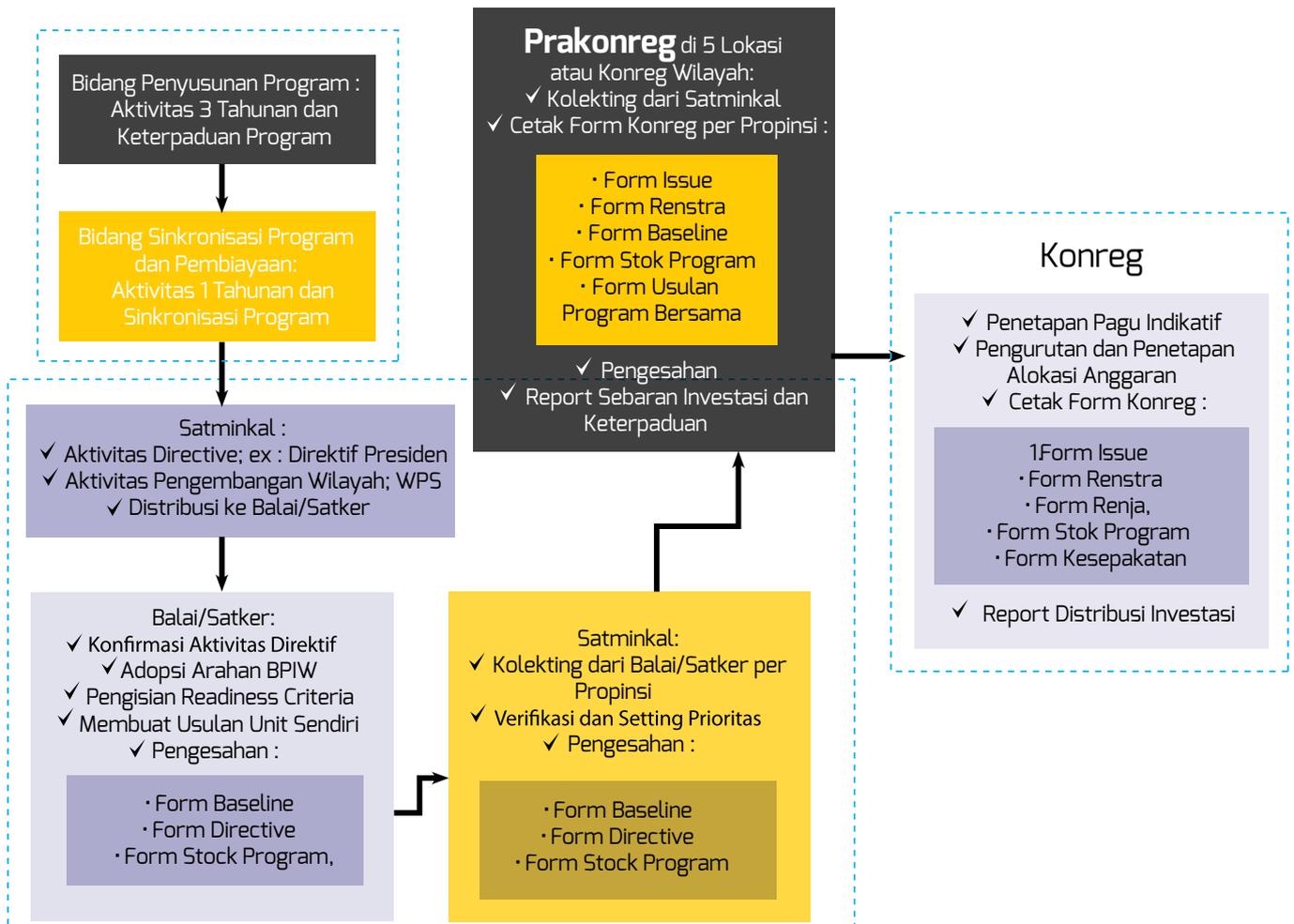
PENGEMBANGAN NASIONAL 2015-2019



Pulau	Kawasan
Nusa Tenggara	Mandalika Labuan Bajo
Maluku	Morotai

Alur Proses Sistem Informasi Pemrograman Tersinkronisasi

Keterpaduan & Sinkronisasi



Cara Praktis Menghindari Penyakit Saat Musim Hujan



Saat musim hujan, rentan terkena penyakit. Penyebabnya, daya tahan tubuh menurun dengan adanya perubahan cuaca secara tiba-tiba dan banyak bakteri maupun virus yang sangat aktif. Berikut 6 cara agar terhindar dari penyakit saat musim hujan:

1. Mengonsumsi buah yang mengandung vitamin C

Buah yang mengandung vitamin C kaya akan antioksidan yang membantu mengusir penyakit dalam tubuh. Vitamin C bisa didapatkan dari buah-buahan, seperti jeruk dan tomat.

2. Segera mandi setelah diguyur hujan

Harus segera mandi setelah diguyur hujan, karena jika dibiarkan maka kuman-kuman penyebab penyakit akan mudah datang. Mandi dapat menstabilkan suhu badan sehingga kuman yang terbawa oleh hujan tidak menyebabkan penyakit.

3. Perbanyak minum air putih

Salah satu cara untuk mencegah penyakit saat hujan tiba adalah dengan memperbanyak minum air putih, karena bisa membantu tubuh mengusir kuman atau bakteri jahat yang dibawa hujan.

4. Jangan merokok

Merokok saat hujan bisa menyebabkan tubuh mudah terkena penyakit, karena asap rokok melemahkan daya tahan dan sistem pernapasan seseorang. Sebaiknya, berhenti atau setidaknya meminimalkan merokok

selama musim hujan, sehingga daya tahan lebih baik.

5. Membersihkan tangan

Pencegahan penyakit paling sederhana adalah dengan cara mencuci tangan. Dengan mencuci tangan secara rutin, bakteri yang menempel pada tangan akan terbawa oleh air.

6. Mengeluarkan keringat

Flu merupakan penyakit yang paling sering diderita saat musim hujan. Nah, jika tidak ingin flu menyiksa, setelah anda merasakan gejala penyakit ini, segera mencari cara untuk mengeluarkan keringat. Olahraga merupakan cara paling efektif untuk mengeluarkan keringat. Dengan keluarnya keringat dari dalam tubuh akan membuat tubuh kembali fit dan terhindar dari penyakit. **Dina**

Pembangunan Infrastruktur Dorong Munculnya Industri Pariwisata

Darmin Nasution

Menteri Koordinator Perekonomian



Indonesia memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat bersaing dengan negara-negara lain. Untuk mengembangkan dan meningkatkan angka kunjungan wisata Indonesia, pemerintah telah menetapkan 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dari 25 KSPN ini, pemerintah menfokuskan pada 10 KSPN, seperti kawasan wisata Danau Toba, Mandalika, Tanjung Lesung, dan Labuan Bajo. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution berpendapat, wisata di Indonesia semestinya juga menjadi industri pariwisata. Bagi mantan Gubernur Bank Indonesia ini dengan adanya industri pariwisata yang dikembangkan pemerintah, dapat menghasilkan devisa lebih banyak apabila tempat wisata tersebut dibangun dengan baik.

Selama ini Indonesia selalu bertopang pada industri ekspor seperti bidang pertambangan dan perkebunan tanpa menyadari bahwa sektor tersebut dapat habis dan terpengaruh dengan kondisi global. Hal ini berbeda dengan sektor pariwisata. Darmin bahkan optimis dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan, industri pariwisata akan muncul seiring dengan pembangunan infrastruktur yang digalakkan Presiden Joko Widodo.

"Seharusnya kita dari dulu membangun industri termasuk infrastrukturnya. Nah sekarang kita membangun infrastruktur terlebih dahulu, baru nanti sekitar 2-3 tahun industri itu baru muncul," kata Darmin, di Jakarta (13/2) lalu.

Pria asal Tapanuli Sumatera Utara ini

juga menilai, apabila kawasan wisata seperti Danau Toba dapat dikelola dengan baik, maka dapat menarik wisatawan lebih banyak, tidak hanya wisatawan dalam negeri tapi juga mancanegara. Dalam mengembangkan kawasan Danau Toba, Darmin menyarankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencontoh Provinsi Bali dalam mengembangkan kawasan wisata. Bagi Darmin, Bali berhasil karena mampu menyatukan keberagaman di dalamnya seperti kerajinan masyarakat dan kegiatan keagamaan. "Bahkan ada konferensi-konferensi skala internasional yang dilakukan di sana. Saya kira di Sumatera Utara harus dikembangkan tak hanya Danau Toba saja. Saya rasa kita mampu," tegasnya.

Namun keindahan wisata tidak cukup, bila tidak diiringi dengan promosi. Dengan promosi yang gencar, Darmin meyakini akan banyak wisatawan tertarik mengunjungi daerah tersebut. "Bukan kebetulan bahwa pemerintah berusaha mempercepat kawasan pariwisata baru, kalau secara umum memang lama pendekatannya. Kita punya Danau Toba bukan hanya indah, tapi sejarahnya juga hebat. Namun kita juga harus menyadari ada daerah wisata yang berhasil dan kurang berhasil. Contoh di Sulawesi ada Toraja, dulu tahun 80-an pernah sangat populer, tapi sekarang tidak begitu terkenal. Jadi jangan sampai Danau Toba seperti itu," ucapnya.

Darmin juga percaya sektor pariwisata dapat cepat menghasilkan devisa dan menyerap tenaga kerja sehingga bisa menggerakkan ekonomi, terutama perekonomian di daerah tersebut. Untuk pengembangan sektor pariwisata itu, diperlukan investasi pendukung, seperti hotel, restoran, dan resor. Pembangunan sektor pariwisata ini juga perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga dapat memudahkan wisatawan saat mengunjungi kawasan wisata tersebut. **Hendra/Naufal**



KUNJUNGI INFO BPIW DI WEBSITE & AKUN KAMI:

www.bpiw.pu.go.id

 **@informasiBPIW**

 **Layanan Informasi BPIW**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR**



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH (BPIW) KEMENTERIAN PUPR

SUKSESKAN PELAKSANAAN

KONSULTASI REGIONAL
(KONREG)
MARET 2016

